



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BEKASI**

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BEKASI**

**LAPORAN
KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI**

2023



**LAPORAN
KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI**

2023

**LAPORAN KINERJA
BPS KABUPATEN BEKASI
2023**

No. Publikasi : 32160.2301
Katalog BPS : 1202059.3216
Ukuran Buku : B5 (18,2 cm x 25,7 cm)
Jumlah Halaman : x + 90 halaman

Naskah:

BPS Kabupaten Bekasi

Gambar Kulit:

BPS Kabupaten Bekasi

Diterbitkan oleh:

BPS Kabupaten Bekasi

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Laporan Kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bekasi sebagai penyelenggara negara. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan laporan ini adalah untuk menciptakan transparansi kinerja BPS Kabupaten Bekasi sehingga dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BPS Kabupaten Bekasi. Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada Tahun 2023, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Bekasi tahun 2020 - 2024. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan sebagai bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal di tahun mendatang. Seluruh pimpinan BPS Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Bekasi, Januari 2024

Kepala BPS Kabupaten Bekasi,



Nevi Hendri, S.Si, M.M

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Eksekutif	vi
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi	4
1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bekasi Dengan Dukungan Anggaran 2023	8
1.5. Potensi dan Permasalahan	13
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	21
Bab II. Perencanaan	22
2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Bekasi 2020-2024	23
2.2. Tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi	29
2.3. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bekasi	34
2.4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	43
Bab III. Akuntabilitas	46
3.1. Capaian Kinerja BPS Provinsi Kabupaten Bekasi Tahun 2023	70
3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2021	70
3.3. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Terhadap Target Renstra 2020 - 2024	75
3.4. Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	78
3.5. Kinerja Anggaran Tahun 2023	85
3.6. Kegiatan Prioritas di BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	86
3.7. Penghargaan dan Inovasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	101
Bab IV. Penutup	103
4.1. Kesimpulan	104
4.2. Tantangan dan Kendala Utama	106
4.3. Saran dan Tindak Lanjut	107

1.1	Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	7
1.2.	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	12
2.1	Rumusan Visi dan Misi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	25
2.2	Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	30
2.3	Indikator dan Target BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020 – 2024	33
2.4	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	44
3.1	Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	48
3.2	Nilai Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	49
3.3	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	54
3.4	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	60
3.5	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	64
3.6	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	67
3.7	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2020	71
3.8	Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	73
3.9	Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 Terhadap Target Renstra 2021	75
3.10	Rincian Anggaran A	82
3.11	Rincian Anggaran B	83
3.12	Efisiensi Program Dukungan Manajemen.....	84
3.13	Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program	85
3.14	Penghargaan, Quick Wins dan Agenda Perubahan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022	101

DAFTAR GAMBAR

1.1	Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Desember Tahun 2023	8
1.2	Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Statistisi Tahun 2023.....	10
1.3	Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2023	11
2.1	Nilai Inti BPS	28
2.2	Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2020 – 2024 ...	39
3.1	Rata-rata Target, Realisasi,, dan Capaian Kinerja Tahun 2023 per Tujuan/Sasaran	53
3.2	Realisasi Anggaran Tahun 2023 per Program	74
3.3	Nilai SMART BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	77
3.4	Penyerapan Anggaran BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	78
3.5	Penghargaan yang Diterima BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	102

DAFTAR LAMPIRAN

1	Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi	108
2	Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023.....	109
3	Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2023	113
4	Capaian Kinerja Triwulanan (CKT) BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	116
5	<i>Respon Rate</i> Sensus dan Survei Tahun 2023.....	117
6	Tabel ARC Publikasi BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023	120
7	Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan – SKD 2023.....	120
8	Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST – SKD 2023	120

RINGKASAN EKSEKUTIF

Secara kelembagaan BPS ditetapkan sebagai instansi vertikal melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007. Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik melalui sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lainnya, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Sebagai instansi pemerintah, BPS memiliki peranan dalam perstatistikan nasional dan merupakan pusat rujukan data, metadata maupun penyelenggara kegiatan statistik. Data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS digunakan sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan dan memformulasikan kebijakan. Peranan sentral yang dimiliki BPS ini memerlukan komitmen kuat dari setiap aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja guna mewujudkan penguatan akuntabilitas instansi.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 BPS Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Tahun 2020 – 2024, hal tersebut merupakan perwujudan visi, misi, tujuan, yang tertuang dalam sasaran strategis BPS Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 – 2024 dan kemudian disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS Kabupaten Bekasi periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional.

Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yakni:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Implementasi tujuan strategis BPS Kabupaten Bekasi selama kurun waktu tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut : tujuan pertama yaitu Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan dengan sasaran Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas dengan rata-rata capaian kinerja 111,44 persen, kemudian tujuan kedua Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN dengan rata-rata capaian 110,00 persen. Selanjutnya tujuan ketiga yaitu Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN dengan sasaran Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I dengan capaian sebesar 100,00 persen dan tujuan keempat yakni Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi dengan sasaran SDM Statistik yang

Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 99,86 persen.

Sementara keempat tujuan dan sasaran dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) indikator-indikator sasaran strategis sehingga pencapaiannya lebih terukur dan terperinci. Tercatat capaian kinerja dari 7(tujuh) indikator sasaran, 6 (enam) indikator diantaranya telah melampaui target yang telah ditetapkan, sementara 1 (satu) indikator lainnya yakni indikator Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat belum memenuhi target yang diharapkan, dengan target 68,99 point tercapai 70,40 point untuk penilaian SAKIP.

Penyerapan anggaran BPS Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 94,08 persen dari total anggaran Rp 28.442.995.000,-. BPS Kabupaten Bekasi melakukan *refocussing* anggaran sesuai dengan ketentuan dari BPS Pusat dengan metode penghematan/*self-blocking*. Namun demikian semua kegiatan tetap berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan Covid-19.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 2/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama oleh pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber

daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020- 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut: “Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju” . Pada penyusunan RKP tahun 2023, penajaman dilakukan terhadap Program Prioritas Nasional (PN). Untuk mendukung kegiatan Program Prioritas Nasional (PN) tersebut, BPS Kabupaten Bekasi selama tahun 2023 melakukan rangkaian kegiatan pada 6 (enam) output, yaitu :

1. Sensus Sampel Long Form SP2020;
2. Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi;
3. Survei Statistik Wisatawan Nusantara;
4. Survei Statistik Wisatawan Manca Negara;
5. Survei Statistik E-Commerce;
6. Sensus Pertanian;
7. Survei Statistik Tanaman Pangan/Ubinan;
8. Survei Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi Metode KSA;

Sepanjang tahun 2023 semua Program, Kegiatan dan Anggaran telah dilakukan secara maksimal, efektif dan efisien sehingga hasil optimal yang dicapai sudah sejalan dengan capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan. Indikator sasaran strategis yang masih rendah pencapaiannya pada tahun 2023, akan menjadi fokus evaluasi untuk perbaikan tahun selanjutnya.

1 *PENDAHULUAN*

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2022

1.1. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyediakan data statistik dasar. Data ini dapat dijadikan input bagi perencanaan kebijakan pembangunan nasional. Peran BPS ini diperkuat oleh landasan legal UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yaitu menyelenggarakan statistik dasar. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik mengatur lebih lanjut bahwa tugas BPS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beban tugas yang diberikan kepada BPS berkonsekuensi terhadap komitmen aparatur sipil negara BPS untuk menjaga akuntabilitas

penyelenggaraan Statistik dan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat luas khususnya pengguna data dan informasi statistik.

Komitmen seluruh aparatur sipil negara BPS Kabupaten Bekasi mencakup pertanggungjawaban terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan. Lebih jauh, diperlukan pengukuran kinerja organisasi diperlukan sebagai indikator kesuksesan organisasi. Sebagai institusi pemerintah maka BPS menetapkan visi dan misi yang merupakan landasan utama untuk mencapai target kinerja yang ingin dicapai. Visi BPS tahun 2020-2024 adalah Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju.

Upaya peningkatan kinerja organisasi BPS memiliki sinergi kuat dengan agenda Reformasi Birokrasi BPS dengan sepuluh area perubahan dimana secara umum bertujuan membangun profil dan perilaku aparatur BPS yang profesional, berintegritas tinggi dan mengemban amanah dalam memberi pelayanan prima atas hasil data statistik yang terpercaya sehingga menjadi aksesibel oleh pengguna data.

Secara khusus pada pilar ketujuh area perubahan Reformasi Birokrasi BPS terdapat penguatan akuntabilitas kinerja dimana kinerja organisasi dievaluasi dengan penilaian terhadap pencapaian outcome dari program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahun dalam bentuk Indikator Kinerja Utama.

Bentuk pelaporan pertanggungjawaban kinerja program dan kegiatan terhadap pemakaian anggaran pemerintah dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja secara periodik.

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala BPS Kabupaten Bekasi melalui Kepala BPS kepada Presiden atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Bekasi pada tahun 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bekasi berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta untuk sistematikanya mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaporan akuntabilitas kinerja di lingkungan BPS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.

1. Mengenali potensi dan permasalahan internal dan eksternal yang dihadapi;
2. Menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan *output*;
3. Menilai efektivitas pencapaian hasil (*outcome*) terhadap perencanaan yang dilakukan;
4. Menilai apakah kualitas hasil telah memenuhi keinginan/kepuasan pengguna data;
5. Menilai apakah pencapaian *output* dan *outcome* sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres RI) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka tugas, fungsi, susunan

organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik sebagai berikut: Badan Pusat Statistik adalah instansi vertikal dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Sebagai instansi vertikal, BPS mempunyai kantor perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perwakilan BPS pada tingkat kecamatan diwakili oleh para Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

a. Kedudukan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik merupakan landasan konstitusional Badan Pusat Statistik yang menyatakan tentang kedudukan dan kewenangannya. Di dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa BPS berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berwenang menyelenggarakan statistik dasar. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih rinci melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di daerah, bahwa BPS Kabupaten Bekasi adalah Perwakilan BPS di Daerah Tingkat I Kabupaten Bekasi dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS RI.

Sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi maka pada BPS Provinsi dipimpin oleh seorang kepala pejabat setingkat Eselon II, yang membawahi satu Bagian Umum yaitu Kepala Bagian Umum dan lima Koordinator Fungsi yaitu Koordinator Fungsi Statistik Sosial, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi, Koordinator Fungsi Statistik Produksi, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik dan Koordinator Fungsi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik. Perwakilan BPS di daerah bertanggung jawab melaksanakan kegiatan

statistik di daerah dan bertugas membantu Pemerintah Daerah setempat dalam penyelenggaraan statistik daerah dan penyediaan data yang diperlukan.

b. Tugas

Berdasarkan Keputusan Kepala BPS Nomor 001 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS, dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, BPS Kabupaten Bekasi mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mewujudkan tugas pokok tersebut, BPS Kabupaten Bekasi berupaya menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif, dan efisien guna mendukung pembangunan nasional maupun regional, meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dengan cara mengembangkan statistik spesifik daerah.

c. Fungsi

Adapun dalam rangka pelaksanaan tugas pokoknya, BPS Kabupaten Bekasi mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Pengkajian dan penyusunan Kebijakan Regional Kabupaten Bekasi di bidang kegiatan statistik;
2. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Bekasi;
3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS;
4. Fasilitator pembinaan statistik terhadap kegiatan Instansi Pemerintah di bidang kegiatan statistik;

5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana kepegawaian keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga;

d. Susunan Organisasi

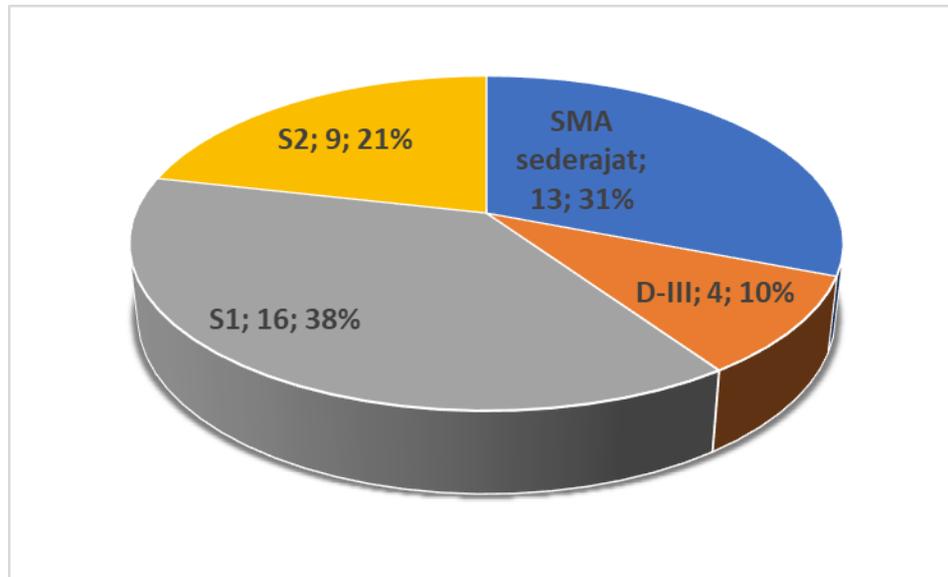
Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik No.7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi mengenai Nomenklatur jabatan hasil penyederhanaan organisasi, maka susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1.
Organisasi dan Jabatan Hasil Penyederhanaan Organisasi
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	JABATAN		TUGAS TAMBAHAN
	SEBELUM PENYEDERHANAAN ORGANISASI	SETELAH PENYEDERHANAAN ORGANISASI	
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala BPS Kabupaten	Kepala BPS Kabupaten	-
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	Kepala Subbagian Umum	-

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM) BPS Kabupaten Bekasi dengan Dukungan Anggaran 2022

Jumlah pegawai BPS di Kabupaten Bekasi kondisi bulan Desember tahun 2023 berjumlah 41 pegawai. Secara tidak langsung salah satu indikator yang dapat menentukan kualitas suatu SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan pegawainya. SDM BPS Kabupaten Bekasi secara kualitas pendidikan sebenarnya sudah sangat memadai, namun jumlahnya masih kurang ideal dibanding beban kerja yang ada.



Gambar 1.1.
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Tingkat Pendidikan Bulan Desember tahun 2023

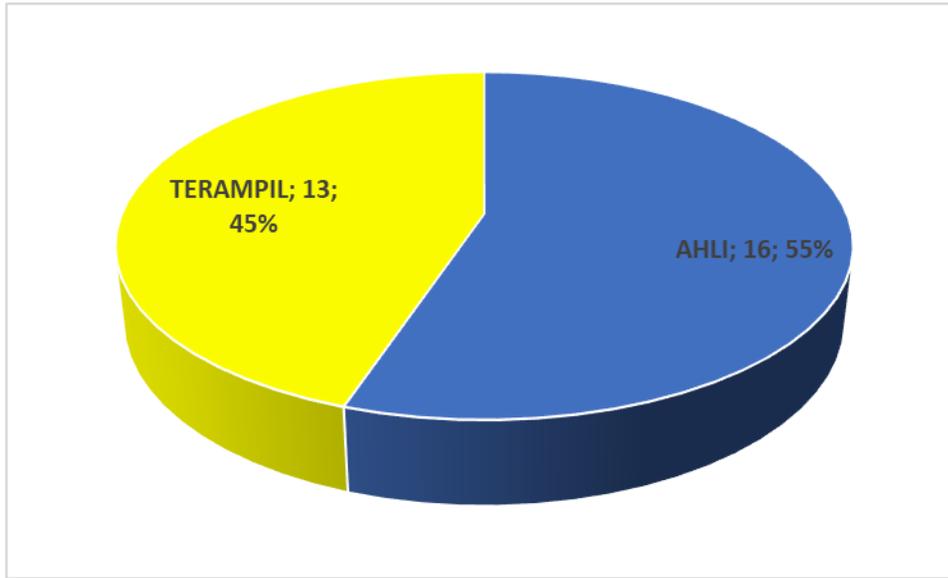
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi menurut tingkat pendidikan terdiri dari pegawai dengan pendidikan S-2 sebanyak 9 orang (21%), berikutnya S-1/D-IV sebanyak 16 orang (38%), D-III sebanyak 4 orang (10%), dan SMA sebanyak 13 orang (31%). Gambaran tersebut mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Bekasi cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS.

Meskipun kualitas SDM secara umum baik, namun mengingat beban pekerjaan per pegawai cukup besar tentu hal ini bisa mempengaruhi kualitas pekerjaan. Oleh karena itu perlu memperhitungkan beban tugas di masing-masing fungsi dalam menentukan jumlah SDM di fungsi tersebut.

Peningkatan kapasitas SDM melalui jalur pendidikan terus dilakukan. Selain mendidik calon pegawai melalui sekolah kedinasan milik BPS yaitu Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (Polstat STIS), peningkatan juga dilakukan melalui aktivitas rintisan pendidikan gelar dengan cara memberi kesempatan kepada pegawai untuk menempuh pendidikan tingkat S2 melalui jalur Tugas Belajar dan Izin belajar. Tahun 2023, tidak ada pegawai BPS di Kabupaten Bekasi mendapatkan ijin belajar melanjutkan ke jenjang pendidikan S-2

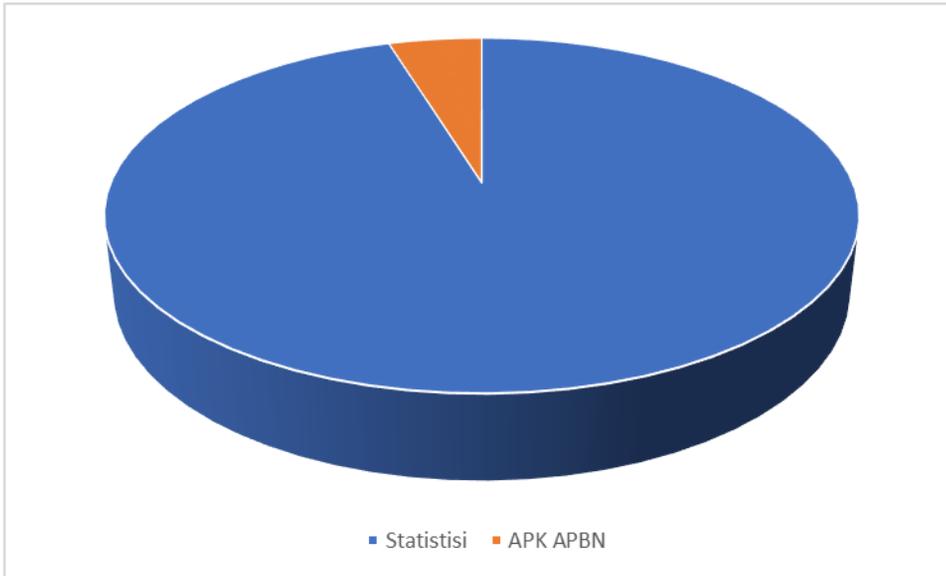
Selain dari sisi pendidikan, peran jabatan fungsional juga semakin ditingkatkan. Pada Tahun 2023 tercatat sebanyak 21 pegawai (50 persen) dari sejumlah 42 pegawai BPS Kabupaten Bekasi telah menduduki jabatan fungsional tertentu.

Dari seluruh pejabat fungsional tertentu yang dimiliki BPS Kabupaten Bekasi sebesar 95 persen atau 29 pegawai merupakan pejabat fungsional statistisi, dengan rincian sebagai berikut: 16 pegawai merupakan statistisi tingkat ahli dan 13 pegawai merupakan statistisi tingkat terampil (Gambar 1.2).



Gambar 1.2.
Komposisi SDM BPS Kabupaten Bekasi Menurut Jabatan Fungsional Statistisi

Selain pejabat fungsional statistisi, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi membuka peluang bagi pegawainya untuk mengambil jabatan fungsional tertentu lainnya. Dari 30 pejabat fungsional tertentu, sebanyak 1 orang adalah pejabat fungsional tertentu lainnya Analis Pengelola Keuangan APBN (1 orang). Grafik dapat dilihat pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3.
Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu SDM BPS Kabupaten Bekasi
Menurut Jabatan Fungsional Tahun 2023

Tabel 1.2.
Jumlah pegawai menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	JABATAN	JUMLAH (ORANG)	PERSE N	JENIS KELAMIN			
				LAKI- LAKI	%	PEREM PUAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala BPS Kabupaten Bekasi	1	2.38	1	100	0	0
2	Kepala Subbagian Umum	1	2.38	1	100	0	0
3	Pelaksana (Fungsional Umum)	10	23.81	9	90	1	10
4.	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	1	2.38	0	0	1	100
5.	Statistisi Ahli Madya	1	2.38	1	100	0	0
6.	Statistisi Ahli Muda	9	21.43	3	33	6	67
7.	Statistisi Ahli Pertama	6	14.29	2	33	4	67
8.	Statistisi Penyelia	2	4.76	1	50	1	50
9.	Statistisi Pelaksana (Pemula, Pelaksana dan Pelaksana Lanjutan)	11	26.19	7	63	4	37
TOTAL		42	100,00	19	100,00	23	100,00

1.5. Potensi Dan Permasalahan

1.5.1. Potensi

Dalam melaksanakan tugas, BPS telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjamin kemandirian dan independensi BPS sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, antara lain:

1. Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
3. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik; dan
5. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 116 Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 643).

Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik merupakan payung hukum bagi BPS untuk menyelenggarakan kegiatan statistik yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik. Sesuai dengan undang-undang tersebut, BPS menjadi lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar.

BPS juga menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Potensi BPS diharapkan dapat menjadi *booster* transformasi di BPS dari sisi kualitas data, kelembagaan dan SDM, serta sistem dan infrastruktur tercakup secara keseluruhan dalam program STATCAP CERDAS (*Statistical Capacity Building-Change and Reform for Development of Statistics*).

Secara kelembagaan, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan, dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik dasar baik di pusat maupun di daerah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN). BPS menjadi lembaga (*National Statistics Office/NSO*) yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

Potensi BPS dalam bidang teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas kegiatan statistik, baik dari sisi pengumpulan, pengolahan maupun diseminasi. Penggunaan *mobile applications* akan menjadikan proses pengumpulan data survei berlangsung dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, dalam hal diseminasi data, penggunaan *mobile applications* akan memudahkan pengguna data untuk mengakses data BPS dari mana pun.

Dengan penggunaan *mobile applications* ini, penyajian data BPS menjadi lebih tepat waktu, dan mudah diakses. Teknologi *cloud computing* juga memberikan peluang bagi BPS untuk menampung hasil seluruh survei di dalam satu *data warehouse*.

Sustainable Development Goals (SDG's), menjadi pendorong bagi penyelenggara maupun pemerhati statistik untuk lebih meningkatkan peran sertanya dalam menilai pencapaian kinerja pembangunan di Kabupaten Bekasi. BPS Kabupaten Bekasi memiliki peran yang krusial di dalam mendukung pencapaian target sejumlah indikator kinerja yang merefleksikan SDG's.

BPS merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk dapat menyediakan data statistik tentang pencapaian Indonesia di sejumlah area fokus SDG's, seperti misalnya pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*); pertanian, ketahanan pangan dan nutrisi yang berkelanjutan (*sustainable agriculture, food security and nutrition*); kesehatan; pendidikan; air dan sanitasi; energi; pertumbuhan ekonomi, lowongan kerja dan infrastruktur. Jelaslah, dalam konteks perencanaan strategis periode 2020-2024, BPS harus dapat menjawab kebutuhan pemenuhan data dan informasi indikator SDG's tersebut.

1.5.2. Permasalahan

BPS Kabupaten Bekasi telah mengidentifikasi sejumlah permasalahan yang perlu diatasi dalam periode renstra 2020 – 2024, baik itu permasalahan internal (kelemahan yang bersumber dari dalam organisasi BPS) maupun permasalahan eksternal (ancaman). Kendala maupun permasalahan BPS Kabupaten Bekasi harus mendapatkan respon yang tepat. Sehingga citra BPS Kabupaten Bekasi sebagai pelopor data terpercaya bagi semua dari sudut pandang responden maupun masyarakat umum sebagai pengguna data dapat terus meningkat. Adapun permasalahan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kebutuhan pengguna data terhadap peningkatan kualitas data dan informasi statistik semakin meningkat. Pengguna data menginginkan agar data dapat tersedia lebih cepat (*faster*), dapat diperoleh lebih mudah (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*). Oleh karena itu dibutuhkan komunikasi untuk dapat menampung kebutuhan pengguna data yang semakin beragam. Saat ini, belum terbentuk suatu strategi komunikasi yang koheren kepada pengguna data. Strategi komunikasi ini dibutuhkan untuk mendiseminasikan data statistik secara akurat kepada setiap pengguna data;
2. *Respondent burden* atau keengganan responden untuk berpartisipasi secara mendalam pada sensus/survei yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Bekasi merupakan suatu permasalahan yang perlu penanganan yang bersifat holistik, mengingat kegiatan statistik yang dilakukan BPS Kabupaten Bekasi adalah statistik yang bersifat pengakuan, dan bukan pengukuran. Keakuratan pengakuan dari sumber data menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas data statistik. BPS Kabupaten Bekasi dapat mengatasi hal ini melalui upaya peningkatan hubungan dan komunikasi dengan para responden baik responden rumah tangga maupun pelaku usaha di sejumlah sektor industri agar informasi yang disampaikan responden dapat tersampaikan dengan akurat serta sesuai dengan fakta yang responden ketahui;
3. Adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan

terhambatnya proses pengumpulan data dan kesulitan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan daerah pemekaran;

4. Kebutuhan terhadap jenis data dan informasi statistik wilayah kecil (*small area statistic*) termasuk data mikro hingga saat ini belum dapat terpenuhi. Di samping itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu, sehingga belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat;
5. Peningkatan kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan *ad-hoc* yang diselenggarakan. Dengan meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat *ad-hoc* yang seringkali terdapat beberapa kegiatan yang pelaksanaannya berlangsung pada saat yang sama tidak sebanding dengan ketersediaan SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas statistik khususnya di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan;
6. Ketepatan waktu rilis (*timeliness*) yang masih belum optimal merupakan permasalahan lain yang teridentifikasi. Permasalahan ini berkaitan erat dengan proses pengumpulan, pengolahan dan analisis hasil statistik yang sering terkendala, sebagai akibat adanya tumpang tindih pelaksanaan survei baik dari sisi waktu maupun dari sisi konten. Kekurangtepatan waktu rilis juga dikarenakan koordinasi antar pusat-pusat dan pusat-daerah yang masih lemah, yang mana hal ini terjadi karena kurang terintegrasinya komunikasi antara pusat dan daerah;
7. BPS Kabupaten Bekasi memiliki sistem dan infrastruktur TI yang belum cukup memadai untuk mendukung operasional BPS. Berbagai daya dan upaya dilakukan untuk perbaikan dan kemajuan serta penyesuaian dengan

kemajuan teknologi agar setiap kebutuhan dan permintaan masyarakat dapat dipenuhi, dan setiap tantangan dan permasalahan yang ada dapat ditanggulangi;

8. Di sisi lain, pemanfaatan Sumber Data Baru (di antaranya adalah *big data* dan *data administrative*) yang telah berkembang dewasa ini, belum maksimal dimanfaatkan oleh BPS. Pentingnya *big data* tidak hanya melihat seberapa banyak data yang dimiliki, tetapi juga apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Efek dalam pemanfaatan sumber data baru mungkin dapat menjadi jawaban yang memungkinkan, antara lain:
 - Pengurangan biaya,
 - Pengurangan waktu,
 - Pengembangan output, dan penawaran yang dioptimalkan,
 - Pengambilan keputusan yang cepat.
9. Prasarana dan sarana yang tidak memiliki standar, membuat kebutuhan BPS tidak memiliki arah yang tepat dalam proses penyediaannya. Penekanan *infrastructure grand map* yang menjadi arah pengembangan office *standardized needs* hingga saat ini masih bersifat wacana. Maka perlu adanya perbaikan dalam pemetaannya dan fokus dalam implementasinya guna meningkatkan pelayanan pengguna data dan internal pegawai.
10. Manajemen kantor yang berkonsep tradisional, menyebabkan orientasi bukan mengarah pada proses, tetapi berorientasi pada output yang dihasilkan guna mencapai outcome yang diharapkan. Hal ini berpengaruh pada kualitas data yang berimbas pada tingkat kepuasan pelayanan terhadap pengguna data. Sebagai lembaga yang mempunyai visi “Pelopor Data Statistik Terpercaya Untuk Semua”, diharapkan selalu meningkatkan kinerja

dengan menerapkan manajemen kantor modern yang berprinsip *money follow program* yang berorientasi *outcome*.

11. Peran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) saat ini yang hanya sebagai enabler sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang diharapkan. Peran TIK saat ini bukan hanya sebagai *tools* tetapi dengan berprinsip "*IT used as salutation in measuring the success*" bukanlah menjadi jawaban terhadap tantangan ke depan. Kelemahan terhadap ketergantungan pada produk TIK memang tidak dapat dihindarkan, namun hal ini jika tidak dimanfaatkan secara tepat menyebabkan kemalasan akibat ketergantungan. Namun dengan menerapkan "*IT for Function and Solution as empowering achievement*", diharapkan adanya perubahan *mindset* dari ketergantungan terhadap TIK menjadi memanfaatkan TIK sebagai solusi dan sesuai fungsi yang efisien terhadap penggunaan anggaran.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor eksternal dan internal sehingga bisa dilakukan langkah-langkah strategi yang akan disusun sebagai berikut:

1. Faktor Internal

- a. Kekuatan/*Strengths*
 - i) Tersedianya SDM yang berkualitas sampai level daerah
 - ii) Tersedianya infrastruktur/sarana prasarana TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang memadai
 - iii) Data geospasial kebutuhan BPS tersedia dalam format elektronik
 - iv) Pemanfaatan *big data* bisa dilakukan dengan beberapa *exercise* untuk memastikan posisi *big data* dan *official statistic*

b. Kelemahan/*Weaknesses*

- i) Proses bisnis statistik yang berjalan sendiri (belum terintegrasi)
- ii) Penyediaan dan pemanfaatan sarana teknologi informasi belum optimal
- iii) Keterbatasan kanal diseminasi
- iv) Keterbatasan *resources* (anggaran, jumlah SDM, dan infrastruktur) yang tersedia

2. Faktor Eksternal

a. Peluang/*Opportunities*

- i) BPS sebagai lembaga strategis penyedia data statistik untuk pembangunan (rujukan utama dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan)
- ii) *Big data* dan data administratif yang sangat banyak dan beragam
- iii) Permintaan cakupan estimasi sampai dengan area terkecil
- iv) Kualitas metodologi survei dan sensus sesuai standar internasional
- v) BPS dipercaya sebagai sumber data statistik untuk kebijakan Pemerintah
- vi) Tingginya permintaan data kekinian untuk mendukung kebijakan strategis
- vii) Adanya lembaga survei lain yang banyak berkembang di Indonesia sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* tertentu

b. Ancaman/*Threats*

- i) Produk statistik tidak dimanfaatkan oleh pengguna data
- ii) Keraguan masyarakat terhadap kredibilitas BPS sebagai penghasil data yang berkualitas

- iii) Tingginya resistensi responden terutama di kota besar (penolakan responden)
- iv) Tingginya *respondent burden* (beban responden)

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Penyajian laporan akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Bekasi diuraikan menurut sistematika pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dengan sistematika sebagai berikut.

- Bab I. Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia dan dukungan anggaran BPS, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS; serta sistematika penyajian laporan;
- Bab II. Perencanaan**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS 2022;
- Bab III. Akuntabilitas**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS, Capaian Kinerja BPS terhadap Target Renstra 2020 - 2024, Prestasi Tahun 2022, Upaya Efisiensi BPS Tahun 2022, dan Realisasi Anggaran Tahun 2022;
- Bab IV. Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

2 PERENCANAAN

2.1. Rencana Strategis BPS Kabupaten Bekasi 2020- 2024

Dalam mendukung Visi Pembangunan Indonesia 2005-2025 yaitu “Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur” dan visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 yang merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, BPS berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pembangunan nasional di bidang statistik.

Pembangunan nasional di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keragaman data dan informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap data dan informasi, serta memperhatikan kesiapan SDM penyelenggara statistik dalam penyediaan data yang berkualitas.

Upaya BPS untuk meningkatkan penyediaan data yang berkualitas sejalan dengan Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Mewujudkan bangsa yang berdaya saing” sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan memperhatikan misi pembangunan nasional dan pencapaian BPS pada Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode keempat 2020– 2024, melalui telaah dan analisis yang mendalam dan komprehensif BPS menetapkan visi tahun 2020-2024 sebagai berikut.

“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”
(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Dalam visi yang baru tersebut berarti bahwa BPS berperan dalam menghasilkan data statistik nasional maupun internasional, untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung Indonesia Maju.

Dengan visi BPS 2020-2024, eksistensi BPS sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena memegang peran dan pengaruh sentral dalam penyediaan statistik berkualitas tidak hanya di Indonesia, melainkan juga di tingkat dunia. Dengan visi tersebut juga, semakin menguatkan peran BPS sebagai Pembina data statistik.

Misi BPS dirumuskan dengan memperhatikan fungsi dan kewenangan BPS, visi BPS serta melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-1 (Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia), ke-2 (Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing) dan yang ke-3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan), dengan uraian sebagai berikut.

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tabel 2.1.
Rumusan Visi dan Misi BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

VISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020-2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 -2024
		1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional
		2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan
		3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional
		4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Uraian penjelasan dalam Misi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi tahun 2020-2024 sebagai berikut.

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional

Badan Pusat Statistik merupakan penyelenggara statistik dasar, yaitu statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintah ,maupun masyarakat (Perpres No. 86 Tahun 2007).

Kualitas suatu output statistik dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang/dimensi, untuk itu pengukuran kualitas ditentukan melalui pemenuhan sekumpulan dimensi kualitas (*Statistik Korea, n.d.:10; Helfert & Foley, 2009: 187*).

Ada 6 (enam) dimensi kualitas statistik yang digunakan oleh BPS, meliputi *relevance* (relevansi), *accuracy* (akurasi), *timeliness* (aktualitas) & *punctuality* (tepat waktu), *accessibility* (aksesibilitas), *coherence* (koherensi) & *comparability* (keterbandingan), *interpretibility* (interpretibilitas).

... dan berstandar internasional...

“Setiap penyelenggaraan kegiatan, BPS akan berpedoman kepada konsep, standar dan metode yang berlaku secara universal dan berstandar internasional, mengikuti kaidah yang digariskan dalam *Fundamental Principle of Official Statistics*”.

2. Membina K/L/D/I Melalui Sistem Statistik Nasional yang Berkesinambungan

Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997). BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran.

Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan

rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

3. Mewujudkan Pelayanan Prima di Bidang Statistik untuk Terwujudnya Sistem Statistik Nasional

Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan.

4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah.

SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah.

... profesionalisme ...

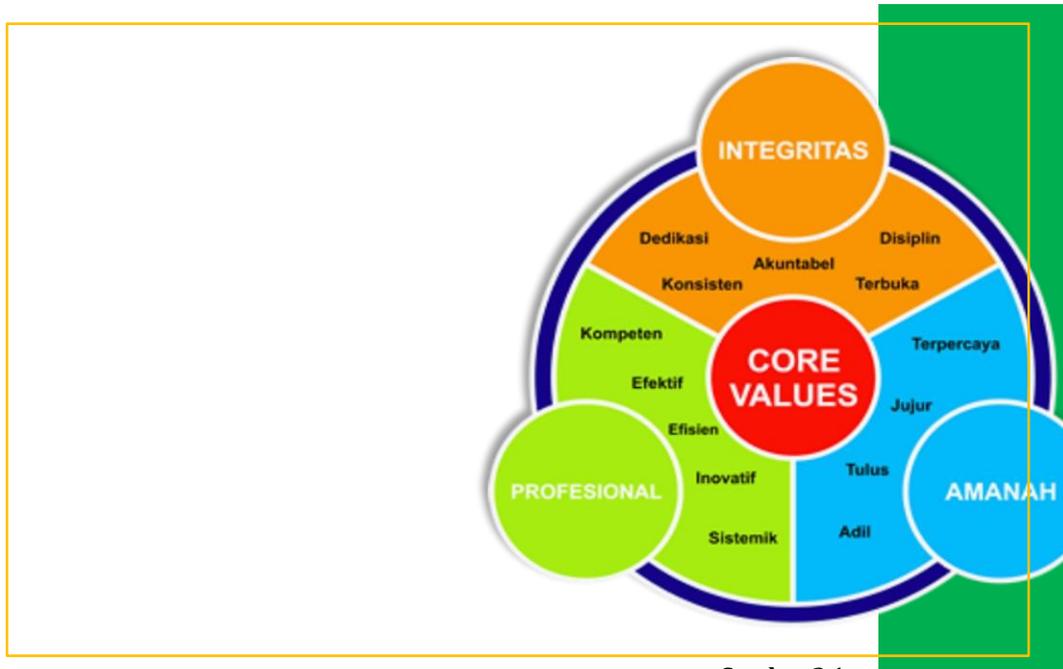
“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.



Gambar 2.1.
Nilai Inti BPS

2.2. Tujuan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Tujuan diartikan sebagai kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi organisasi. Undang-undang nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik.

Dalam Undang-undang ini disebutkan bahwa statistik penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan berbagai kegiatan di segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila untuk memajukan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Di samping itu, dalam rangka perwujudan Sistem Statistik Nasional, kerja sama dan koordinasi statistik antar instansi, lembaga/departemen, lembaga internasional, negara asing dan masyarakat luas perlu diwujudkan demi tercapainya koordinasi statistik nasional secara terpadu sebagai amanat dari Pasal 17 dan 18 Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997.

Rumusan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan berikut ini.

Tabel. 2 2
Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

VISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 - 2024	Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju	MISI BPS KABUPATEN BEKASI 2020 -2024
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional 2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan 3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional 4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan 2. Meningkatnya kolaborasi, inetgrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi 	

Rumusan tujuan BPS Kabupaten Bekasi dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi BPS Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut.

1. Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan:
Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan :
Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan:
Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan:
Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Tujuan pertama pembangunan statistik menuntut BPS untuk meningkatkan kualitas data statistik dalam rangka menyediakan data statistik yang akan digunakan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Tujuan pertama ini akan didukung dan diupayakan dengan menerapkan program Statcap-CERDAS (*Statistical Capacity Building – Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia*) dalam kerangka penjaminan kualitas.

Tujuan kedua, meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, di dalam tujuan tersebut memuat misi BPS untuk meningkatkan peran BPS: sebagai Pusat Rujukan Statistik dalam terselenggaranya SSN,

sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat.

Tujuan ketiga, meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN. Keberhasilan upaya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik tidak terlepas dari dukungan dan peranan TIK, yang diwujudkan melalui pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan TIK statistik. Tujuan ketiga ini akan diperkuat oleh komponen kedua Statcap-Cerdas yaitu Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sistem informasi manajemen statistik.

Tujuan keempat, penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, di dalam tujuan tersebut terkait dengan misi membangun insan statistik yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kemampuan tenaga statistik di pusat maupun daerah harus terus dilakukan. Tujuan keempat ini diperkuat dengan komponen ketiga Statcap-Cerdas yaitu pengembangan sumber daya manusia.

Keberhasilan BPS dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan BPS. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.3.
Indikator dan Target BPS Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

No	TUJUAN		TARGET				
	URAIAN	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	60	64	92	100	100
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	(*)	(*)	50	50	80
3.	Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang mendapatkan Pembinaan Statistik	(*)	(*)	90	100	100
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bekasi	61	61,5	65	70	71

2.3. Sasaran Strategis BPS Kabupaten Bekasi

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan internal).

Renstra BPS Kabupaten Bekasi tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arahan Presiden dengan mengikuti *money follow program*, yang artinya seluruh Program KL harus mengikuti arahan visi misi yang ditetapkan Presiden, sehingga program-program antar KL dapat disinergikan. Oleh karena itu, dalam Renstra BPS Kabupaten Bekasi ini termasuk restrukturisasi program sesuai dengan arahan Presiden tersebut yang ditujukan untuk menunjukkan nomenklatur program yang dapat menggambarkan outcome dalam pencapaian sasaran pembangunan baik pencapaian yang dilakukan oleh satu Kementrian/Lembaga, maupun antar Kementrian / Lembaga (Lintas K/L), sesuai dengan kesepakatan dalam TM restrukturisasi program BPS yang terdiri dari : (1) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) dan (2) Program Dukungan Manajemen (Dukman).

Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan

perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.

Dalam rangka mendukung pencapaian 4 (empat) tujuan sebagaimana disebutkan di atas, BPS telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh BPS. Sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran strategis yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BPS pada setiap perspektif yang akan dicapai oleh BPS pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Perspektif *Stakeholder*

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - Sosialisasi kepada masyarakat
 - Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi.

- Meningkatkan jumlah dan kompetensi SDM
 - Membuat *customer relationship management*
 - Menyusun *data mining* pengguna data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
- Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS
 - Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - Jumlah satker yang menerapkan *smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
 - Dokumen *grand design smart office* termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik.
- d. Meningkatkan penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:

- Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - Jumlah *technical assistance* yang dilakukan BPS di NSO
 - Jumlah MoU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - Jumlah NSO yang menerima statistikal *capacity building* di BPS
 - Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif *Customer*

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas.

Dengan indikator sasaran:

- a. Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional
- b. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I.

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK.

3. Perspektif *Internal Process*

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN.

Dengan indikator sasaran:

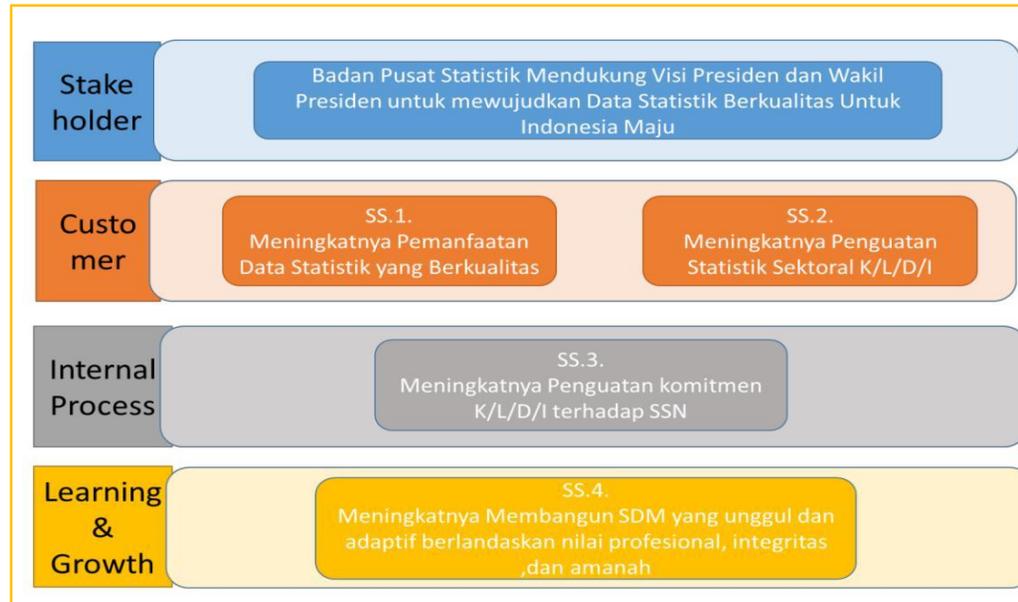
- a. Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- b. Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif *Learning and Growth*

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- a. Nilai SAKIP BPS Kabupaten Bekasi
- b. Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS



Gambar 2.2.
Peta Strategi Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi 2020 - 2024

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. BPS telah menetapkan nilai-nilai inti yang dapat dijadikan sebagai pedoman oleh setiap pegawainya dalam menetapkan keputusan berkaitan dengan upaya pencapaian visi dan misi BPS.

Nilai-nilai Inti (*core values*) Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

- Profesionalisme (Kompeten, Efektif, Efisien, Inovatif dan Sistemik);
- Integritas (Dedikasi, Disiplin, Konsisten, Terbuka dan Akuntabel);
- Amanah (Terpercaya, Jujur, Tulus dan Adil).

Sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2022 Tentang Implementasi *Core Values dan Employer Branding* Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka penguatan Budaya Kerja dan transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, Indonesia telah meluncurkan Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding ASB “Bangga Melayani Bangsa”.

Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, adalah sebagai berikut.

1. Berorientasi Pelayanan

Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan’
- c. Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

Akuntabel yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. Membantu orang lain belajar;
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
- b. Suka menolong orang lain;
- c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
- b. Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara;
- c. Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
- c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergis, dengan perilaku sebagai berikut :

- a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah;
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

2.4. Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Bekasi 2021

Setiap awal tahun, target yang harus dicapai selama setahun ditetapkan untuk tiap indikator tujuan dan sasaran strategis. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan adanya perubahan visi, misi dan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik 2020 – 2024 serta adanya perubahan pada Perka IKU Badan Pusat Statistik 2020 – 2024 No.38 Tahun 2020 maka target kinerja BPS Kabupaten Bekasi pada Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 mengikuti tujuan, sasaran dan indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Perka IKU tersebut.

Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 ditanda tangani pada tanggal 31 Maret 2021. Realisasi kinerja dari target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan tersebut akan selalu dimonitoring setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan kinerja yang diukur setiap triwulanan dan pada akhir tahun secara kumulatif dilaporkan menjadi laporan kinerja tahunan.

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Kabupaten Bekasi. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen (Dukman), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2023

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(5)
T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
1.1. Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik yang Berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	100
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN			
2.1. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	50

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023
(1)	(2)	(3)	(5)
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	100
T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
3.1. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
4.1. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	70
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	Persen	98,3

3 AKUNTABILITAS

LAPORAN KINERJA BPS KABUPATEN BEKASI 2022

Akuntabilitas kinerja adalah tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2023. Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 merupakan pencapaian dari indikator-indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis selama Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target PK Tahun 2022 yang telah ditetapkan pada awal tahun. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dijelaskan pada uraian di bawah ini.

3.1. Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2023

Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Dalam hal ini, capaian kinerja diukur dari Perjanjian Kinerja yang memuat tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian selama satu tahun. Perjanjian Kinerja Badan Pusat Statistik mempunyai 4 (empat) tujuan, 4 (empat) sasaran strategis dan 7 (tujuh) indikator sebagaimana dituangkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 seperti pada Tabel 2.4 sebelumnya.

3.1.1. Capaian Kinerja Tujuan

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 dijabarkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu capaian kinerja tujuan dan capaian kinerja sasaran strategis. Masing-masing capaian tersebut diuraikan sebagai berikut.

Sepanjang Tahun 2023, Ada 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai BPS Kabupaten Bekasi yaitu:

Tabel 3.1.
Capaian Kinerja Tujuan BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	TUJUAN
(1)	(2)
1.	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan
2.	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN
3.	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN
4.	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Keempat tujuan tersebut memiliki indikator utama dengan capaian sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Nilai Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

NO.	TUJUAN	SASARAN	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1/ S1	Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	S1. Presentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	100,00	100,00	100,00
T2/ S2	Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan	S2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	80,00	100,00	110,00
T3/ S3	Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	S3. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persen	80,00	80,00	100,00
T4/ S4	Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	S4. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,75	84,73	99,86
Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan/Sasaran						106,09

Tujuan pertama yaitu “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” diukur dengan

sasaran indikator “Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional”. Indikator ini mencerminkan penilaian konsumen terhadap kualitas data statistik (BPS) yang dihasilkan yang meliputi 5 (lima) ragam data, yaitu: Data Statistik Sosial, Statistik Produksi, Statistik Distribusi dan Jasa, Neraca dan Analisis Statistik, serta Metodologi Statistik.

Tujuan kedua yaitu “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN” diukur dengan sasaran indikator “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”. Sistem Statistik Nasional adalah suatu tatanan yang terdiri atas unsur-unsur yang secara teratur saling berkaitan, sehingga membentuk totalitas dalam penyelenggaraan statistik. Sistem Statistik Nasional perlu diwujudkan secara terus-menerus dan berkelanjutan (UU No. 16 tahun 1997).

BPS juga memiliki mandat untuk melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah untuk membangun pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran. Bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan nasional pada khususnya, dan pembangunan sistem rujukan informasi statistik nasional pada umumnya, penyelenggaraan kegiatan statistik perlu didukung upaya-upaya koordinasi dan kerja sama serta upaya pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat statistik (PP no.51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik).

Amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia bahwa Badan Pusat Statistik bertindak sebagai Pembina data statistik yang menetapkan struktur baku dan format baku metadata, memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data, melakukan pemeriksaan ulang terhadap data prioritas, dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Tujuan ketiga yaitu “Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN” yang diukur dengan sasaran indikator “Penguatan Statistik Sektor K/L/D/I”. Dalam pelayanan prima, kepuasan masyarakat menjadi tujuan utama. Kepuasan ini dapat terwujud jika pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Standar pelayanan adalah ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dengan memperhatikan baku mutu pelayanan. Adapun layanan data yang disediakan oleh BPS terdiri atas:

1. Layanan konsultasi dan rekomendasi kegiatan statistik;
2. Layanan konsultasi pengguna data;
3. Layanan perpustakaan tercetak;
4. Layanan perpustakaan digital;
5. Layanan penjualan buku dan;
6. Layanan data mikro/peta digital/softcopy publikasi.

Setiap permintaan data akan dilayani sesuai dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tujuan keempat yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi” yang diukur dengan sasaran indikator “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan”. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas, dan amanah. SDM statistik yang unggul dan adaptif pada insan statistik yang profesionalisme, berintegritas, dan amanah.

... profesionalisme ...

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas.”

... integritas ...

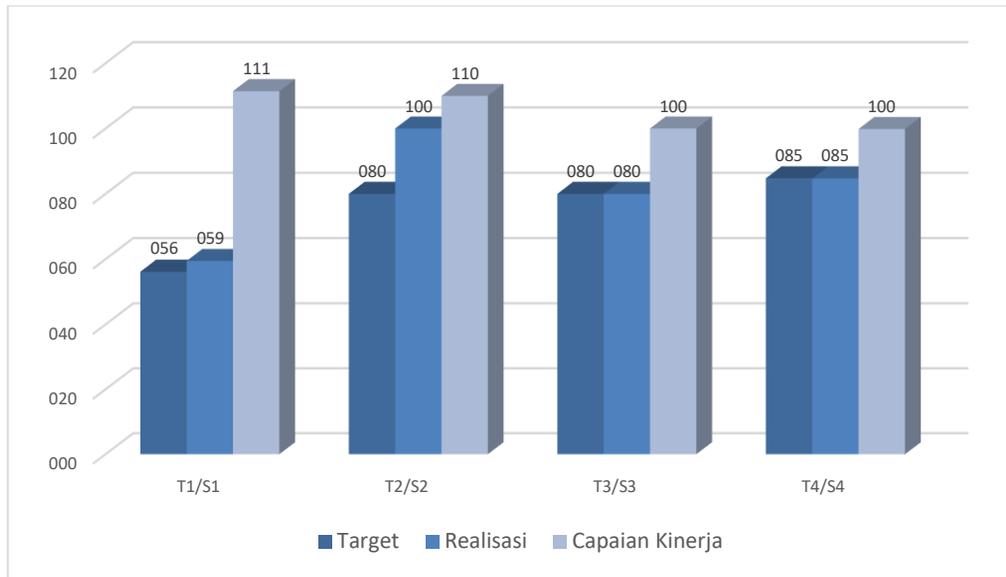
“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (Pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satu kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

...amanah...

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”.

Di dalam Penilaian SAKIP meliputi 5 (lima) komponen besar yang menjadi objek evaluasi dari Inspektorat BPS. Kelima komponen besar tersebut meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Masing-masing komponen mempunyai bobot penilaian yang beragam. Dari total bobot (100), komponen perencanaan kinerja mempunyai bobot (30), komponen pengukuran kinerja mempunyai bobot (25), pelaporan kinerja mempunyai bobot (15), evaluasi kinerja mempunyai bobot (10) dan pencapaian kinerja mempunyai bobot (20).

Ketercapaian realisasi terhadap target dari masing-masing tujuan disajikan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.1.
Rata-rata Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 per Tujuan/Sasaran

Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada ulasan berikut.

1. Capaian Kinerja Tujuan Pertama

Tujuan pertama adalah Menyediakan data statistik yang dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, diukur dengan indikator Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional. Tujuan pertama dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas, dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama, indikator “Persentase pengguna data yang

menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi” dan indikator ‘Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional’. Capaian kinerja dari indikator-indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Pertama
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	1.1.1. Presentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan	Persen	100,00	100,00	100,00
		1.1.2. Presentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-1						100,00

Berdasarkan pada Tabel 3.3 target **tujuan pertama** “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan **sasaran pertama** yakni “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” dengan indikator “Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan

evaluasi” adalah 100,00 persen dan realisasi capaian menunjukkan bahwa 100,00 persen konsumen merasa puas dengan kualitas data BPS. Dengan demikian capaian kinerja tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” adalah sebesar 100,00 persen. Demikian halnya dengan sasaran indikator ‘Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional” dengan target 100,00 persen dapat direalisasikan sebesar 100,00 persen, meskipun indikator ini merupakan penghitungan nilai dari rata-rata jumlah publikasi yang dihasilkan semua bidang akan tetapi sudah melampaui capaian sebesar 100,00 persen. Adapun rata-rata capaian kinerja sasaran strategis tujuan pertama telah terlampaui sebesar 100,00 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan “Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan” dengan sasaran “Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas” telah tercapai dengan baik.

Secara umum, BPS Kabupaten Bekasi telah melakukan beberapa hal untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya adalah dengan memaksimalkan peran Tim Pelaksana khususnya Pilar Penataan Tata Laksana. Tim ini bertugas untuk memastikan apakah proses pengumpulan data yang dilakukan sudah sesuai dengan *Standar Operasional Prosedur (SOP)* atau buku pedoman yang digunakan sebagai panduan dalam pengumpulan data dari survei bersangkutan.

Peningkatan kualitas data juga dilakukan dengan lebih mengaktifkan peran para pengawas dan memastikan bahwa peran yang harus diambil terlaksana dengan baik. Selama ini disinyalir bahwa peran para pengawas belum berjalan maksimal yang diindikasikan dengan masih banyaknya perbaikan yang dilakukan pada tahap editing coding dan pengolahan dokumen pencacahan. Seharusnya pengawas memastikan apakah data yang dikumpulkan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum data diserahkan kepada unit pengolahan.

Kepada para petugas, sebelum melakukan pendataan juga dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan, agar lebih mahir dalam menggali informasi dari responden. Petugas juga dituntut untuk terus menjalin hubungan yang baik dengan responden sebagai sumber data melalui pendekatan kekeluargaan dalam melakukan wawancara. Selain itu berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah diajarkan petugas senantiasa diingatkan bahwa dalam melakukan pendataan di lapangan, agar selalu memperhatikan konsistensi dari data yang dikumpulkan karena adanya keterkaitan antara data yang satu dengan data lainnya.

Untuk melengkapi kegiatan di atas, penanggungjawab kegiatan juga telah melakukan monitoring kualitas. Monitoring kualitas atau pengendalian kualitas dibuat pada saat kegiatan sedang berlangsung yang bertujuan untuk menjaga kualitas hasil dari kegiatan yang sedang dilaksanakan serta untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan yang terjadi baik dari sisi cakupan (*coverage*) maupun isi (*content*) data yang dikumpulkan. Hasil dari kegiatan ini selanjutnya tertuang dalam bentuk dokumen pengendalian proses kegiatan.

a. Kendala Yang Dihadapi

- Masih belum maksimal dalam pembuatan publikasi untuk menghasilkan publikasi statistik yang bersumber dari aktivitas statistik yang sudah menerapkan standar akurasi.
- Data BPS belum dijadikan rujukan utama bagi seluruh pemangku kepentingan;

- Perencanaan kegiatan yang kurang terpadu sehingga menjadi tumpang tindih saat pelaksanaan kegiatan pada unit wilayah terbawah atau pada tingkat pelaksana lapangan;
- Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam waktu bersamaan menyebabkan pelaksanaannya tidak berjalan maksimal dan tidak sesuai rencana yang telah disusun. Kondisi tersebut menuntut penggunaan tenaga non organik (mitra statistik), namun ketersediaan mitra statistik yang kompeten di kabupaten/kota jumlahnya terbatas;
- Belum lengkapnya identitas perusahaan dalam kerangka *sample* dan Direktori Perusahaan sehingga sering kesulitan menemukan alamat responden di lapangan;
- Sulitnya mendapat data neraca perusahaan terutama untuk usaha yang berkategori IMK, sehingga petugas menemukan kendala dalam menggali informasi terkait neraca perusahaan tersebut;
- Penerimaan responden perusahaan terhadap petugas dan kegiatan survei yang dilaksanakan oleh BPS cenderung masih rendah;
- Waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan beberapa survei sangat panjang, sehingga data yang dihasilkan kurang objektif;
- Kejenuhan responden, baik responden rumah tangga maupun perusahaan terkena sampel untuk beberapa survei dengan tujuan yang berbeda;
- Tidak adanya program berkelanjutan bagi mitra untuk membantu kegiatan BPS, sehingga proses transfer *knowledge* tidak berjalan dengan baik;

- Penerimaan dokumen di akhir jadwal pelaksanaan, sehingga proses pemeriksaan, *editing* dan *coding* data tidak maksimal;
- Buku pedoman dan penegasan masih sering dikoreksi dan belum dapat menjawab permasalahan lapangan;
- Pada pengolahan data seringkali aplikasi program dari BPS RI harus di update dengan beberapa kali patch baru sehingga proses pengolahan data terhambat karena perlu penyesuaian kembali.

b. Strategi Yang Dilakukan

- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Identifikasi substansi laporan pertanggungjawaban yang belum terpenuhi sehingga menjadi input bagi laporan periode mendatang;
- Secara internal melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan;
- Manajemen lapangan didesain dengan strategis dan efektif;
- Proses perekrutan petugas mitra statistik dilaksanakan dengan selektif, efektif dan efisien;
- Pengelolaan pengiriman dan penerimaan dokumen di pusat pengolahan ditertibkan. Upayakan agar proses pengiriman data yang sudah selesai di tingkat petugas lapangan dilakukan bertahap, sehingga tidak menumpuk pada akhir kegiatan;
- Menyusun penegasan-penegasan yang terstruktur untuk beberapa kasus yang tidak dijelaskan dalam Buku Pedoman;

- Meningkatkan efektivitas kegiatan revisit dan penjemputan atau kunjungan ulang ke perusahaan-perusahaan yang menjadi unit pendataan misalnya bekerjasama dengan BPS RI, agar memiliki kekuatan institusi lebih besar;
- Secara aktif memberikan input bagi penyempurnaan program aplikasi pengolahan ke BPS RI pada tahap perencanaan program sehingga saat pelaksanaan pengolahan aplikasi sudah sempurna untuk dieksekusi.

c. Rencana Aksi

- Menyusun matrik jadwal kerja yang memuat beban kerja petugas dan target waktu penyelesaian sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat dilaksanakan dengan baik;
- Melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang ada di wilayah kerja petugas dengan melihat direktori yang tersedia maupun turun langsung ke lapangan, sehingga non respon sudah diketahui secara dini;
- Meningkatkan komunikasi dengan sumber-sumber data baik rumah tangga, perusahaan maupun instansi pemerintah;
- Identifikasi petugas mitra yang dapat dilibatkan pada kegiatan sensus maupun survei BPS dalam setiap kesempatan;
- Memelihara dan mengembangkan hubungan baik dengan para mitra statistik;
- Melaksanakan transformasi proses bisnis statistik dengan mengintegrasikan beberapa survei dengan objek atau tujuan yang serupa;
- Mitigasi resiko yang akan muncul pada setiap tahapan survei.

2. Capaian Kinerja Tujuan Kedua

Tujuan kedua adalah “Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN”, diukur dengan indikator Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik dan indikator Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu “Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN” Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Kedua
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	2.1.1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	50,00	50,00	100,00
		2.1.2. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-2						100,00

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian indikator sasaran dari tujuan 2 ini sebesar 100,00 persen berdasarkan hasil capaian dari 2 (dua) indikator yang mendukung Sasaran Strategis “Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN”, yakni indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik dengan capaian 50,00 persen, serta indikator persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar dengan nilai capaian 100,00 persen.

“Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN” yang diukur dengan indikator “Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik” tentu ada permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target ini, yakni masih kurangnya pengetahuan para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik, untuk berkoordinasi dengan BPS sebelum pelaksanaan kegiatan statistik tersebut dilaksanakan. Dalam rangka memperbaiki kondisi tersebut, maka BPS Kabupaten Bekasi berusaha lebih giat lagi untuk mensosialisasikan terkait tupoksi BPS sebagai instansi yang mengeluarkan rekomendasi kegiatan statistik.

Indikator kedua “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar” dalam hal ini metadata statistik sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi Pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah yang bersangkutan.

Sedangkan Statistik Khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan intern dari suatu instansi/perusahaan swasta dalam rangka penyelenggaraan riset atau penelitian.

Pada kegiatan pemberian rekomendasi statistik dilaksanakan seiring dengan pelaksanaan pembinaan statistik. Rekomendasi statistik diperlukan dengan tujuan pemeriksaan rancangan Survei Statistik Sektoral dan pemberian rekomendasi agar pada setiap survei tidak terjadi duplikasi, tepat sasaran dan tidak membebani responden, memakai metodologi/variabel yang sesuai dan sudah baku serta terkoordinir dengan baik, serta didukung oleh sistem yang baik. Kegiatan pembinaan statistik ini dapat berjalan dengan baik, hal ini merupakan hasil dari kolaborasi BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data dan Diskominfo sebagai Walidata dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data senantiasa berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bekasi (Walidata) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Kabupaten Bekasi. Secara bertahap dan konsisten, BPS dan Diskominfo memberikan pembinaan terkait pengelolaan statistik sektoral dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan statistik khusus. BPS dan Diskominfo juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pelaksana statistik sektoral.

Hal ini dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi salah satunya adalah Forum Satu Data Jabar. Forum ini memudahkan komunikasi terkait masalah/kesulitan apa yang dihadapi oleh para pelaksana statistik sektoral sehingga segera dapat diberikan solusi. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kendala Yang Dihadapi

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mempunyai persepsi yang sama tentang metadata, sehingga instansi yang menjadi objek pendataan pengumpulan data belum semua memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Melakukan pembinaan statistik sektoral terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Melalui Diskominfo, maka program pembinaan statistik dilakukan dengan pertemuan secara virtual.

c. Rencana Aksi

Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi dan instansi / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pelaksanaan secara virtual.

3. Capaian Kinerja Tujuan Ketiga

Tujuan ketiga adalah meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, diukur dengan satu indikator yakni persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Mendapatkan Pembinaan Statistik. Tujuan ketiga dicapai

dengan sasaran strategis penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Ketiga
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3.1. Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	3.1.1. Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan Pembinaan Statistik	Persen	100,00	100,00	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-3						100,00

Target capaian dari indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mencapai 100,00 persen, karena dari target 100 persen, yang terealisasi mencapai 100,00 persen sehingga capaian kinerja menjadi 100 persen.

BPS Kabupaten Bekasi sebagai Pembina Data senantiasa berkolaborasi dengan Diskominfo Kabupaten Bekasi (Walidata) dalam mewujudkan Satu Data Indonesia (SDI) di lingkungan Kabupaten Bekasi. Secara bertahap dan konsisten, BPS dan Diskominfo memberikan pembinaan terkait pengelolaan statistik sektoral dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan statistik khusus. BPS dan Diskominfo juga secara aktif melakukan koordinasi dengan pelaksana statistik sektoral.

Hal ini dilakukan dengan cara membuka forum-forum diskusi salah satunya adalah Forum Satu Data Jabar. Forum ini memudahkan komunikasi terkait masalah/kesulitan apa yang dihadapi oleh para pelaksana statistik sektoral sehingga segera dapat diberikan solusi.

Masih kurangnya pengetahuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistic untuk berkoordinasi dengan BPS. Hal ini merupakan salah satu permasalahan yang penting untuk ditanggulangi. Sebagai salah satu cara yang ditempuh adalah lebih mensosialisasikan tentang BPS dalam hal penyelenggaraan statistik.

Tanggung jawab dalam penyediaan statistik sektoral dan statistik khusus sebenarnya terletak pada instansi/perusahaan terkait, namun dalam praktek pelaksanaan dapat bekerja sama dengan BPS. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah Fungsi IPDS dan sumber datanya berasal dari laporan monitoring metadata sektoral dan khusus.

Hal ini menjadi suatu motivasi sekaligus tantangan bagi BPS Kabupaten Bekasi untuk lebih berusaha meraih nilai yang lebih tinggi lagi melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan kinerja sejalan dengan Reformasi Birokrasi.

Satu strategi yang selalu ditempuh untuk membina hubungan kerja sama yang baik dengan instansi/OPD yakni dengan memberikan sosialisasi terhadap instansi/OPD sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan BPS. Dengan demikian diharapkan instansi/OPD bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan kepada BPS Kabupaten Bekasi. Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

a. Kendala Yang Dihadapi

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum mempunyai persepsi yang sama terkait statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK, sehingga instansi yang menjadi objek pendataan pengumpulan data belum semua memberikan jawaban terkait survei yang dilaksanakan.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Melakukan pembinaan statistik sektoral terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga tercipta pemahaman terkait manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan instansi/ Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersedia melaporkan setiap survei yang dilaksanakan.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Melalui Diskominfo, maka program pembinaan statistik dilakukan dengan pertemuan secara virtual.

c. Rencana Aksi

Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi dan instansi / Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan pelaksanaan secara virtual.

4. Capaian Kinerja Tujuan Keempat

Tujuan keempat adalah “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi”, dengan sasaran “SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan” diukur dengan satu indikator yakni Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan indikator Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan

prasarana pelayanan BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6.
Hasil Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan Keempat
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TAR-GET	REALI SASI	CAPAIAN KINERJA (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4.1. SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	4.1.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70,00	70,40	100,57
		4.1.2. Presentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	98,39	98,39	100,00
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tujuan ke-4						100,28

Dalam kaitannya dengan kebijakan reformasi birokrasi saat ini, capaian akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah menjadi suatu hal yang penting dan menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini dikarenakan bahwa pada dasarnya reformasi birokrasi dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk mewujudkan *Good Governance* tersebut, pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akuntabilitas, yang diberi pengertian

sebagai perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Peningkatan birokrasi yang akuntabel merupakan salah satu dari tujuan rencana strategis BPS Kabupaten Bekasi mulai dari menyempurnakan sistem penguatan akuntabilitas kinerja, menyusun dan menerapkan sistem manajemen kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja, sistem monitoring dan evaluasi, sampai kepada penyusunan indikator kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Berdasarkan tabel 3.6, tujuan keempat dicapai dengan 2 (dua) indikator sasaran strategis , yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat dan Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS.

Indikator pertama dari tujuan keempat adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Penanggungjawab dari indikator di atas adalah seluruh bagian dan fungsi di lingkungan BPS Kabupaten Bekasi. Sumber datanya berasal dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat.

BPS Kabupaten Bekasi seperti tahun sebelumnya selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Keberhasilan BPS Kabupaten Bekasi dalam pemenuhan SAKIP diukur berdasarkan penilaian SAKIP oleh Inspektorat baik melalui *Desk Evaluation* maupun *Field Evaluation*.

Berdasarkan peningkatan nilai SAKIP beberapa tahun belakangan, maka BPS Kabupaten Bekasi telah menargetkan nilai SAKIP pada Tahun 2023 sebesar 70.00 point dengan realisasi 70,40 point dengan capaian kinerja sebesar 100,57 persen. Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Inspektorat telah dijadikan acuan dalam memperbaiki manajemen SAKIP di Kabupaten Bekasi, terutama dalam hal perbaikan data kinerja mulai tahap perencanaan sampai tahap pengukuran,

seperti pemenuhan dan kelengkapan prasyarat beberapa indikator, dan perbaikan SOP pengumpulan data kinerjanya akan tetapi dalam hal inovasi BPS Kabupaten Bekasi masih perlu menciptakan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide baru yang dapat memberikan manfaat lebih baik untuk meningkatkan efisiensi, dan efektivitas pelayanan.

Di Tahun 2023 persentase hasil penilaian masyarakat terhadap kepuasan terhadap pemenuhan sarana dan prasarana di BPS Kabupaten Bekasi karena dari target 100 persen, yang terealisasi mencapai 100,00 persen sehingga capaian kinerja menjadi 100 persen.

Berdasarkan capaian kinerja tersebut, ada beberapa masalah/kendala yang dihadapi namun BPS Kabupaten Bekasi telah menyiapkan langkah dan strategi serta melaksanakan aksi sehingga kendala tersebut tidak menjadi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja sasaran di masa mendatang, sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

a. Kendala Yang Dihadapi

- Indikator yang telah ditetapkan BPS Pusat belum semuanya dianggap SMART;
- Hasil penilaian SAKIP inspektorat belum standar antar pemeriksa dan tidak semua dapat dipahami untuk dicarikan tindak lanjutnya.

b. Strategi Yang Dijalankan

- Penilaian kepuasan terhadap sarana prasarana perlu ditinjau ulang dengan menyesuaikan kondisi dan situasi yang berkembang. Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.
- Melakukan pembinaan dari BPS Pusat khususnya Biro Bina Program dan Inspektorat, untuk mengadakan pembinaan SAKIP agar terjadi kesamaan persepsi tentang konsep definisi dan standar sumber data;

- Evaluasi SAKIP oleh inspektorat dapat diimplementasikan dengan mudah oleh Daerah agar dapat di tindak lanjuti.

c. Rencana Aksi

- Melakukan pembinaan SAKIP dengan mengundang BPS Kabupaten/Kota dan BPS Provinsi sebagai pembimbing dan narasumber, juga turut mengundang Tim dari Biro Perencana BPS dan Inspektorat BPS dalam acara Refreshing SAKIP setiap awal tahun;
- Melakukan *field evaluation* terhadap kabupaten/kota secara berkala sehingga laporan kinerja menjadi lebih baik.
- Pelayanan Data dialihkan ke pelayanan online, yang berupa email, call center, dan livechat di website, untuk meminimalisir kontak dan penularan virus.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2022

Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023 terhadap realisasi Kinerja Tahun 2020 pada dasarnya tidak dapat di bandingkan karena memiliki tujuan, sasaran strategis dan indikator yang berbeda, sebagai akibat

adanya perubahan Visi, Misi BPS selaras dengan Rencana Strategis 2020-2024 serta IKU perka no.38 Tahun 2020. Namun dapat dianalisa keterbandingan pencapaian hasil akhir kinerjanya berdasarkan tampilan pada tabel-tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	89,75	89,75	100,00
	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	Persen	92,00	92,00	100,00
	1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Persen	87,50	87,50	100,00
T2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	60,71	60,71	100,00
	2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	50,00	50,00	100,00

TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.1.2. Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar	Persen	71,42	71,42,00	100,00
T3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	90,00	90,00	100,00
	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	90,00	90,00	100,00
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	79,00	80,25	102,27
	4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	65,00	68,99	106,14
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	Persen	93,00	91,5	98,39
Rata-rata Capaian Kinerja Tjuan/Sasaran					102,27

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja tahun 2022 dalam kurun waktu lima tahun Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 dapat dikategorikan cukup baik dilihat dari pencapaian dari tiap-tiap indikator yang ada sebagaimana dijabarkan di tabel di atas. Sekalipun ada beberapa indikator yang belum mencapai nilai sesuai target sebagai dampak dari kondisi dan permasalahan yang ditemui di lapangan, namun dengan berbagai upaya maka permasalahan tersebut dapat diatasi, dan rata-rata capaian kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi untuk tahun 2022 mencapai 107,46 persen.

Tabel 3.8.
Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022 TERHADAP 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
T1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Pers en	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
	1.1.1 Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan	Pers en	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
	1.1.2. Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi	Pers en	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
T2. Meningkatkan	SS2. Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Pers en	75,00	75,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022

TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022 TERHADAP 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	2.1.1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	50,00	50,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
	2.1.2. Presentase Organisasi Perangkat Daerah yang menyampaikan metadada sektoral sesuai standar	Persen	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
T3. Meningkatkan Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
	3.1.1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik	Persen	100,00	100,00	100,00	Capaian 2023 sama dengan capaian 2022
T4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,20	84,20	100,57	Turun 1,7% dibandingkan dengan 2022
	4.1.1 Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70,00	70,14	100,57	Turun 5,57% dibandingkan dengan 2022
	4.1.2 Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS Provinsi	Persen	98,39	98,39	100,00	Naik 1,61% dibandingkan dengan 2022

TUJUAN	SASARAN/ INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA 2023	PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022 TERHADAP 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata Capaian Kinerja Tjuan/Sasaran					100,57	Turun 1,71% dibandingkan dengan 2022

Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk rentang Renstra 2020-2024 sudah termasuk baik karena di atas 100 persen, yaitu sebesar 100,57 persen. Dibandingkan dengan tahun 2022, pencapaian kinerja di Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,71 persen. Sehingga masih banyak hal yang perlu menjadi perhatian untuk ditingkatkan, diperbaiki, dan dilengkapi dalam rangka peningkatan capaian kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3.3. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021

Capaian kinerja BPS Kabupaten Bekasi terhadap target Renstra 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.9.
Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi
Tahun 2022 terhadap Target Renstra 2021

Tujuan	Sasaran/ Indikator	Satuan	Target Renstra					Realisasi	Capaian Terhadap Target Renstra				
			2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)				

T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persen	31,5	34	36,5	39	41,5	59,44	110	111,44			
	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional	Persen	60	65	70	75	80	97,73	120	102,87			
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan,	Persen	3	3	3	3	3	21	100	120,00			
T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2. Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persen	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	100	110	110			
	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	67	67	67	67	67	80	100	100			
	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	20	20	20	20	20	120	120	120			
T.3. Meningkatnya Pelayanan	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persen	20	24	28	32	36	80	120	100			

prima dalam penyelenggaraan SSN	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	20	24	28	32	36	80	120	100			
T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Persen	84,5	84,75	85	85,25	85,5	84,73	89,85	99,86			
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	74	74,5	75	75,5	76	73,74	99,47	98,98			
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	95	95	95	95	95	95,71	80,22	100,75			

Pada tabel diatas, dapat dilihat capaian realisasi Tahun 2022 terhadap target Renstra 2021. Nilai capaian yang diperoleh pada tiap-tiap indikator adalah sebagian besar melebihi nilai yang ditargetkan, meski ada satu indikator yang belum mencapai target, namun tetap optimis untuk dapat melampaui target yang telah ditetapkan ditahun mendatang dengan lebih baik demi meningkatkan kinerja dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi. Secara keseluruhan Tujuan dan Sasaran di Tahun 2022 ini merupakan pencapaian kinerja yang cukup baik yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

3.4. Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Bekasi

Selama Tahun 2023, BPS Kabupaten Bekasi telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dalam rangka menyesuaikan dan memenuhi setiap kebutuhan anggaran sebanyak 11 kali dari DIPA Awal. Dasar hukum dilakukannya Revisi adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tanggal 20 Juni 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan DIPA Awal Nomor : SP DIPA-054.01.2.018672/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 31.295.708.**000**,- dengan rincian sebagai berikut.

1. **Revisi ke-1** dilakukan di DJA, tanggal Pengesahan 28 Desember 2022 dilakukan Berdasarkan Surat dari Pengguna Anggaran BPS No. B-507/ 01000/PR.440/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Automatic Adjustment TA 2023, seluruh satker melakukan Blokir automatic adjustment sebesar 4% terhadap Belanja Tunjangan Kinerja Pegawai dan kegiatan survei di PPIS. Pagu anggaran tetap sebesar **Rp.31.295.708.000**;
2. **Revisi ke-2** dilakukan di DJPB, tanggal Pengesahan 26 Januari 2023, Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-137/32000/PR.440/01/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi ke-2 ini tidak menambah Pagu anggaran;
3. **Revisi ke-3** dilakukan di DJA, tanggal Pengesahan 27 Februari 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-235/02100/ PR.400/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 tentang Revisi DIPA Dalam Rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Revisi DIPA Antar Satker Se Indonesia karena Perubahan Dasar Hitung Anggaran akibat perubahan sampel dan penyesuaian kegiatan pada Program Dukman dan PPIS. Revisi ini menyebabkan Penambahan anggaran sebesar **Rp 137.112.000,-**,
4. **Revisi ke-4** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 12 April 2023. Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-1144/32000/PR.440/04/2023 tanggal 11 April 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi terkait Perubahan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA dan Pemutakhiran data hasil revisi POK. Revisi ini tidak menyebabkan perubahan anggaran, sehingga pagu anggaran tetap sebesar **Rp 31.432.820.000,-**;
5. **Revisi ke-5** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 11 Juli 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-981/02100/ PR.440/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Revisi Anggaran Untuk Mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Revisi DIPA Selindo terkait penyesuaian kegiatan pada Program Dukman dan PPIS. Revisi ini

menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp 400,715.000,-**, sehingga total pagu anggaran menjadi **Rp 31.032.105.000,-**;

6. **Revisi ke-6** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 17 Juli 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-848/02000/ PR.440/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari Blokir Automatic Adjustment TA 2023. Revisi ini menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp 306.659.000,-**, sehingga total pagu anggaran menjadi **Rp 30.725.446.000,-**;
7. **Revisi ke-7** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 22 Agustus 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-951/02000/ PR.400/08/2023 tanggal 7 Agustus 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Revisi ini tidak menyebabkan perubahan pagu anggaran yaitu tetap sebesar **Rp 39.725.446.000,-**;
8. **Revisi ke-8** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 14 September 2023. Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-2621/32000/PR.440/ 09/2023 tanggal 8 September 2023 tentang Usulan Revisi Anggaran. Revisi DIPA Antar Satker se Jawa Barat dalam rangka realokasi Belanja Pegawai dari BPS Provinsi Jawa Barat ke BPS Kab./Kota se Jawa Barat. Revisi ini menyebabkan penambahan anggaran sebesar **Rp530.136.000,-** sehingga pagu anggaran menjadi **Rp31.255.582.000,-**;
9. **Revisi ke-9** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 6 Oktober 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-1740/02100/ PR.440/09/2023 tanggal 22 September 2023 tentang Revisi DIPA TA 2023. Revisi Anggaran dalam rangka optimalisasi anggaran ST2023 menjadi pengadaan PC, UPS dan Scanner. Revisi ini menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp1.787.064.000,-** , sehingga pagu anggaran menjadi sebesar **Rp29.468.518.000,-**;

10. **Revisi ke-10** dilakukan di DJA, tanggal pengesahan 21 Oktober 2023. Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BPS Nomor : B-1179/ 02000/PR.440/10/2023 tanggal 11 Oktober 2023 tentang Revisi Anggaran dalam rangka Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai Automatic Adjustment TA. 2023. Revisi ini menyebabkan penurunan anggaran sebesar **Rp1.045.986.000,-**, sehingga pagu anggaran menjadi **Rp 28.422.995.000,-**;
11. **Revisi ke-11** dilakukan di DJPB, tanggal pengesahan 27 Desember 2023. Berdasarkan Surat dari Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Jawa Barat No. B-3750/32000/PR.440/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan. Revisi ini tidak menyebabkan perubahan anggaran, sehingga pagu anggaran tetap sebesar **Rp28.422.995.000,-**;

Secara total sejak DIPA Awal sampai DIPA Revisi ke-11 dilakukan, terjadi pengurangan anggaran sebesar **Rp. 2.872.713.000,-**.

Tabel 3.10.
Rincian Anggaran A

Uraian	2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.546.000	1.546.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	0.-	0.-
Pendapatan Lain-Lain	0.-	0.-
Jumlah Pendapatan	1.546.000	1.546.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	5.959.006.000	5.432.764.000
BELANJA BARANG	25.336.702.000	22.631.631.000
BELANJA MODAL		378.600.000
Jumlah Belanja	31.295.708.000	28.442.995.000

Tabel 3.11.
Rincian Anggaran B

Uraian	2023	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
(1)	(2)	(3)
Program Dukungan Manajemen	5.959.006.000.-	6.306.997.000.-
BELANJA PEGAWAI	5.209.287.000.-	5.432.764.000.-
BELANJA BARANG	749.719.000.-	799.579.000.-
BELANJA MODAL	0.-	0.-
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	25.336.702.000.-	22.135.998.000.-
BELANJA BARANG	25.336.702.000.-	21.757.398.000.-
BELANJA MODAL	0.-	378.600.000.-
Jumlah Belanja	31.295.708.000.-	28.442.995.000.-

Dari sisi efisiensi penggunaan anggaran, dibanding tahun 2020, BPS Kabupaten Bekasi telah berhasil menghemat penggunaan anggaran di Tahun 2022, antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.12.
Efisiensi Program Dukungan Manajemen

No.	Kegiatan/ Pekerjaan	Nilai Realisasi 2021 (Rp)	Nilai Realisasi 2022 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	973.000	762.000	-
2.	Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19	900.000	0	-
3.	Belanja Langganan Air	8.196.800	8.174.000	-

Anggaran yang di efisiensi dari program DMPTT tersebut, dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain yang masih mengalami kekurangan anggaran. Setiap tindakan efisiensi yang dilakukan sudah diuji, dihitung, dan terutama disetujui oleh

pimpinan dengan melalui berbagai pertimbangan, sehingga anggaran tersebut boleh benar-benar terserap dan dimanfaatkan dengan *output* yang tepat.

3.5 Kinerja Anggaran Tahun 2022

Pagu yang diberikan ke BPS Kabupaten Bekasi untuk menjalankan fungsi pemerintahan selama Tahun 2022 adalah Rp 26.940.171.000.- terbagi ke dalam 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL), dan (2) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Realisasi anggaran menurut program dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Realisasi Anggaran Tahun 2022 Menurut Program

Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMPTTL)	6.098.879.000	6.017.433.603	98.66
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)	45.501.574.000	44.899.753.061	98.68
Total	51.600.453.000	50.917.186.664	98.68

Berdasarkan tabel di atas, realisasi anggaran program DMPTTL adalah sebesar 99,66 persen dari pagu anggaran program DMPTTL, dan realisasi anggaran program PPIS adalah sebesar 98,68 persen dari pagu anggaran program PPIS.

3.6 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2022

Kegiatan prioritas BPS Kabupaten Bekasi pada Tahun 2022 mencakup beberapa kegiatan prioritas nasional yaitu sebagai berikut.

3.6.1. KEGIATAN LONG FORM SENSUS PENDUDUK 2020

Kegiatan LongForm SP2020 dilaksanakan pada bulan Mei 2022 yang diawali dengan rangkaian kegiatan pelatihan instruktur, pelatihan petugas dan pengolahan data. Pendataan LFSP2020 ini menggunakan metode CAPI dengan aplikasi android yaitu FASIH.

3.6.2 PEMUTAKHIRAN KERANGKA GEOSPASIAL DAN MUATAN WILKERSTAT ST2023

Kegiatan ini merupakan bagian dari persiapan diselenggarakannya Sensus Pertanian 2023. Adapun data yang dikumpulkan adalah batas RT/batas SLS, pengumpulan data penggilingan padi, KUD, dan jumlah petani urban farming. Kegiatan ini selain menggunakan peta juga menggunakan aplikasi Wilkerstat untuk keperluan geotagging lokasi infrastruktur.

3.6.3 SURVEI STATISTIK TANAMAN PANGAN/UBINAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Salah satu subsektor pertanian yang mempunyai peranan yang sangat strategis adalah subsektor tanaman pangan,

yang meliputi tanaman padi dan palawija. Peranan penting subsektor tanaman pangan adalah dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Mengingat pentingnya peran subsektor tanaman pangan, dibutuhkan informasi mengenai produksi tanaman pangan yang akurat dan menggambarkan kondisi terkini. Salah satu informasi penting yang dibutuhkan dalam perhitungan produksi tanaman pangan adalah hasil per hektar (produktivitas) yang dikumpulkan secara rutin setiap subround melalui Survei Ubinan.

Tujuan pelaksanaan Survei Ubinan tanaman pangan adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi mengenai produktivitas (hasil per hektar) komoditas tanaman pangan (padi dan palawija).
2. Memperoleh informasi pendukung lainnya, seperti koordinat lokasi ubinan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), penggunaan pupuk, penanggulangan OPT, dan lain-lain.

Pengumpulan data produktivitas (Survei Ubinan) mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota seluruh Kabupaten Bekasi. Informasi pokok yang dikumpulkan melalui Survei Ubinan adalah data produktivitas (hasil per hektar) tanaman padi sawah, padi ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan ubijalar. Informasi pendukung lainnya yang juga dikumpulkan dalam Survei Ubinan antara lain koordinat lokasi ubinan, jenis lahan, cara penanaman, sistem penanaman jajar legowo (khusus padi), jenis kegiatan peningkatan produksi, banyaknya benih yang digunakan, jenis varietas benih yang digunakan (khusus padi dan jagung), banyaknya pupuk yang digunakan, informasi earn pengendalian terkena serangan hama/OPT, informasi bantuan benih, pupuk, alsintan, dan informasi kualitatif terkait dengan produktivitas.

Data yang dikumpulkan adalah hasil ubinan mencakup: Data produktivitas SR I (Bulan Januari - April 2021), data produktivitas SR II (Bulan Mei - Agustus 2021) dan Data produktivitas SR III (Bulan September - Desember 2021).

Kini Survei Ubinan menggunakan pendekatan area, dimana berbasis Kerangka Sampel Area (KSA) menggunakan titik pengamatan pada subsegmen sesuai fase pertumbuhan padi. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih kurat, cepat dan tepat waktu.

Pelaksanaan Lapangan Ubinan Padi dan Palawija



3.6.4 SURVEI STATISTIK PERTANIAN TANAMAN PANGAN TERINTEGRASI METODE KSA

Hingga saat ini pengumpulan data luas panen baik padi maupun palawija masih menggunakan metode konvensional dengan menggunakan daftar isian Statistik Pertanian (SP). Berdasarkan metode tersebut, pengumpulan data luas panen masih didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Meskipun secara praktikal, metode tersebut

mudah untuk diterapkan tetapi penggunaan metode tersebut masih memiliki kekurangan. Rendahnya akurasi dan waktu pengumpulan data yang cukup lama menjadi beberapa kekurangan dari penggunaan metode tersebut.

Dalam rangka mendukung perbaikan data pertanian di Indonesia. Salah satu poin penting pada rekomendasi kebijakan yang diusulkan adalah usulan untuk mempertimbangkan penggunaan aplikasi secara luas metode estimasi produksi padi melalui Kerangka Sampel Area (KSA) yang mengintegrasikan data spasial dan data lapangan menggunakan teknologi komunikasi digital yang lebih obyektif.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPS melakukan kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk menyusun kerangka sampel dan sistem pelaporan yang digunakan dalam pengumpulan data statistik pertanian yang berbasis teknologi dalam rangka memperbaiki metodologi pengumpulan data statistik pertanian. Kerjasama tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu kegiatan yang bertajuk “Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area (KSA)”.

Pendataan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah suatu metode baru yang dikembangkan oleh BPPT bekerjasama dengan BPS dalam rangka memperbaiki metode pengumpulan data luas panen yang didasarkan pada hasil pandangan mata petugas pengumpul data (*eye estimate*). Metode ini dilakukan dengan cara yang lebih obyektif dan modern dengan melibatkan perangkat teknologi di dalamnya. Sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Maksud dan Tujuan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area adalah untuk memperbaiki metode pengumpulan data menjadi lebih obyektif dan modern dengan melibatkan peranan teknologi di dalamnya, sehingga data pertanian yang dikumpulkan menjadi lebih akurat dan tepat waktu.

Pelaksanaan pengumpulan data statistik pertanian dengan menggunakan sistem KSA ini juga diimplementasikan dengan satu aplikasi lagi yang dibuat oleh BPS yaitu Aplikasi KSA Pro yang merupakan tindak lanjut pengembangan dan perbaikan dari kegiatan Kerangka Sampel Area (KSA) selama ini.

Pengumpulan Data Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dilakukan dengan metode *dot sampling*. Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini adalah perangkat/HP android milik pribadi yang sudah terinstall sistem aplikasi KSA versi BPPT dan aplikasi KSA Pro versi BPS.

Dokumentasi Pelaksanaan Lapangan



3.7 Penghargaan, Quick Wins dan Agenda Perubahan

1.7.1. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2022, BPS Kabupaten Bekasi berhasil memperoleh beberapa penghargaan baik itu dari pihak internal dan eksternal. Penghargaan diberikan dalam rangka prestasi di kegiatan teknis dan pelayanan publik. Beberapa penghargaan yang diterima oleh BPS Kabupaten Bekasi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.18
Penghargaan yang Diterima BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

No	Jenis Penghargaan	Peringkat	Bulan	Pemberi Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penghargaan dari KPPN Satker Terbaik III Kategori Pengguna CMS Terbanyak	III	Juli	KPPN Bekas
2	Penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Barat Satker Nilai System Terbaik keempat Hasi Survei Budaya Organisasi (SBO) Tahun 2022	Terbaik ke 4	19 September 2023	BPS Provinsi Jawa Barat
3	Penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Barat Satker Nilai Leadership Terbaik keempat Hasi Survei Budaya Organisasi (SBO) Tahun 2022	Terbaik ke 4	19 September 2023	BPS Provinsi Jawa Barat
4	Penghargaan dari Provinsi Jawa Barat Satuan Kerja Terbaik I dengan Nilai Rata-rata IKPA sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 Pengelolaan Pagu Anggaran di atas 22 Milyar	Terbaik ke I	Oktober	BPS Provinsi Jawa Barat
5	Penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Barat Satuan Kerja Terbaik 1 Kegiatan Statistik Harga Perdesaan dan Harga Produsen Tahun 2023	Terbaik ke I		BPS Provinsi Jawa Barat
6	Penghargaan dari BPS Provinsi Jawa Barat Satuan Kerja Terbaik 2 Satker Terbaik dalam Kegiatan VIMK23 Tahunan Sampel Besar Tahun 2023	Terbaik ke 2		BPS Provinsi Jawa Barat

PIAGAM PENGHARGAAN YANG DITERIMA SELAMA TAHUN 2023



4 *PENUTUP*

4.1. Kesimpulan

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2023 BPS Kabupaten Bekasi telah mengimplementasikan Rencana Strategis (RENSTRA) BPS Tahun 2020 – 2024, hal tersebut merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis BPS Kabupaten Bekasi untuk tahun 2020 – 2024 yang telah disesuaikan dengan visi, misi, dan arahan Presiden dan Wakil Presiden. Renstra BPS Kabupaten Bekasi periode 2020 – 2024 disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020 – 2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra BPS 2020 – 2024 berfokus pada peningkatan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS, yaitu:

1. Penyediaan data statistik berkualitas;
2. Pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan
3. Pembinaan dan koordinasi dalam kerangka Sistem Statistik Nasional.

Dengan tujuan strategis BPS untuk periode 2020 – 2024, yakni:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan;
2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN;
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN; dan
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi

Dalam Renstra BPS Kabupaten Bekasi 2020 – 2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi pada Tahun 2023 telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja yang bersinergi dengan rencana-rencana kerja baik secara vertikal dan horizontal. Sinergi secara vertikal diwujudkan dengan keselarasan antar dokumen perencanaan dengan rencana kerja BPS Pusat. Sinergi secara horizontal diwujudkan dengan terintegrasi dan sinkronnya antara rencana kerja dengan fungsi dan beserta penganggarannya.

Rencana kerja disusun untuk menjaga agar arah kebijakan, program, tujuan dan sasaran menjadi terfokus, sehingga lebih meningkatkan peluang dalam mencapai keberhasilannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memperkuat mekanisme pengendalian dan monitoring serta evaluasinya. Pada Tahun 2023 kebijakan, program dan kegiatan telah berhasil dilaksanakan sehingga tujuan, sasaran strategis, dan indikator kerjanya sebagian besar juga telah berhasil dicapai dengan cukup baik. BPS Kabupaten Bekasi telah meningkatkan perannya dalam menyediakan statistik berkualitas yang tertuang dalam visi dan misi dan tercermin dari capaian indikator kinerja yang terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Kinerja BPS Kabupaten Bekasi 2023 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2023. Dari hasil laporan di atas, pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Bekasi menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat baik. Kesimpulan tersebut terlihat dari indikator tujuan dan indikator sasaran strategis.

Dari keempat tujuan yang ditetapkan ditandai dengan rata-rata pencapaian sebesar 100,28 persen. Dimana capaian kinerja tujuan pertama dengan sasaran

pertama adalah 100,00 persen, capaian tujuan kedua dengan sasaran kedua adalah 100,00 persen, untuk tujuan ketiga dengan sasaran ketiga adalah 100,00 persen dan tujuan keempat dengan sasaran keempat adalah sebesar 100,57 persen. Selain capaian kinerja yang cukup berhasil, prestasi juga diraih oleh BPS Kabupaten Bekasi pada Tahun 2023 melalui prestasi sebagai Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) hasil penilaian Kemenpan RB Tahun 2024.

Kemudian dalam rangka terwujudnya birokrasi *good governance*, BPS Kabupaten Bekasi terus melakukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan melaksanakan pembinaan SAKIP se- Kabupaten Bekasi guna menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih yang memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna nantinya akan tercipta suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Sebagai bentuk peningkatan SAKIP di BPS Kabupaten Bekasi adalah dengan meningkatnya perolehan nilai SAKIP dari 68,99 point di tahun 2022 menjadi 70,40 point di Tahun 2023.

4.2. Tantangan dan Kendala Utama

Secara umum BPS Kabupaten Bekasi telah berhasil melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi misi dan tujuan, sasaran strategis, serta indikator kinerja. Namun di tengah pencapaian tersebut beberapa tantangan yang dihadapi selama Tahun 2023 dan tahun-tahun kedepan diantaranya:

1. Peran BPS yang semakin vital menuntut BPS senantiasa mampu menyediakan data rutin (bulanan, triwulanan dan tahunan) yang tepat waktu dan berkualitas dan tetap menjaga independensi BPS sebagai instansi penyedia data;
2. Tuntutan pengembangan statistik sesuai dengan program kerja pemerintah dan mengakomodir kebutuhan data (khususnya data dasar) bagi para pengguna data;
3. Koordinasi dengan instansi/OPD dalam rangka pembinaan dan peningkatan kerjasama di bidang statistik;

4. Pemanfaatan IT dalam proses bisnis yang dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Bekasi;
5. Tuntutan penyelenggaraan birokrasi yang akuntabel yang terus meningkat.

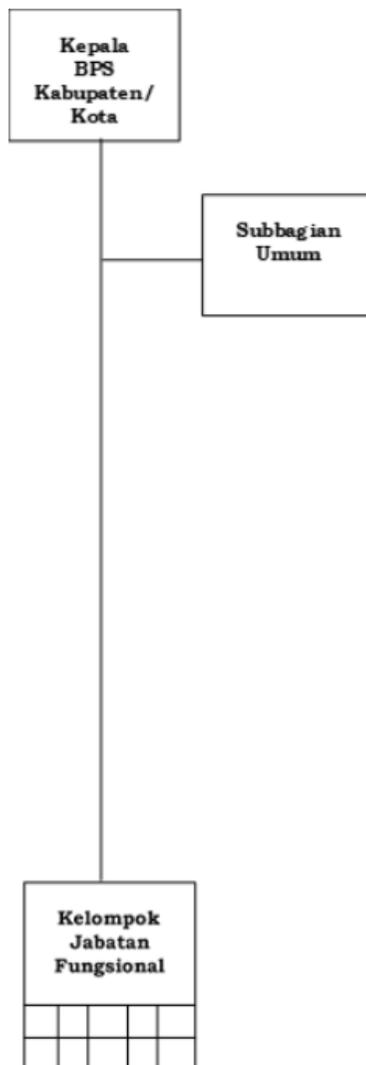
4.3. Saran dan Tindak Lanjut

Saran yang dapat dilakukan guna peningkatan kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kemampuan SDM baik teknis maupun administrasi;
2. Memelihara hubungan baik dengan para pengguna dan sumber data (*user* maupun *respondent engagement*);
3. Mendokumentasikan setiap upaya yang dilakukan terkait dengan perbaikan kualitas data;
4. Identifikasi resiko yang muncul dalam setiap proses output yang dijalankan;
5. Melakukan sosialisasi kegiatan survei yang dilaksanakan dengan tepat sasaran;
6. Membentuk forum data yang beranggotakan BPS Provinsi/BPS Kabupaten/kota dan SKPD.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Susunan Organisasi BPS Kabupaten Bekasi (Peraturan BPS Nomor 8 Tahun 2020)



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN BEKASI**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevi Hendri, S.Si., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Marsudijono, S.Si., M.M.
Jabatan : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Cirebon, 18 Januari 2023
Pihak Pertama


Marsudijono, S.Si., M.M.
NIP. 19640814 198702 1 001


Nevi Hendri, S.Si., M.M.
NIP. 19721130 199203 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BEKASI**

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan			
Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan (%)	Persen	100
	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi (%)	Persen	100
Tujuan 2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik (%)	Persen	50
	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menyampaikan metadata sektoral sesuai standar (%)	Persen	100
Tujuan 3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN			
Penguatan statistik sektoral K/L/D/I	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mendapatkan pembinaan statistik (%)	Persen	100
Tujuan 4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi			
SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian Implementasi SAKIP	Poin	70
	Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS (%)	Persen	98,39

Program	Anggaran
1. Dukungan Manajemen	Rp. 5.959.006.000,-
2. Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	Rp. 25.336.702.000,-
Jumlah	Rp. 31.295.708.000,-

Pihak Kedua


Marsudjiono, S.Si., M.M.
 NIP. 19640814 198702 1 001

Cirebon, 18 Januari 2023
 Pihak Pertama


Nevi Hendri, S.Si., M.M.
 NIP. 19721130 199203 1 001

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Lapangan Tahun 2023

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Deputi Bidang Statistik Sosial													
1	Pendataan Potensi Desa				Apr								
2	Pendataan Short Form SP2020		Feb	Mar				Jul					
3	PES SP2020								Agu	Sep			
4	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Semesteran		Feb						Agu				
5	Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) Tahunan								Agu				
6	Survei Sosial Ekonomi Nasional Kor dan Konsumsi	Jan	Feb	Mar						Sep			
7	Uji Coba PODES 2021									Sep			
8	Penyusunan Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI)					Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
9	Penyusunan Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir (SDLP)					Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
10	Penyusunan Statistik Politik Keamanan		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	
11	Survei Perilaku Anti Korupsi)		Feb	Mar	Apr								
Deputi Bidang Statistik Produksi													
12	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
13	Pendataan Statistik Pertanian Tanaman Pangan Terintegrasi dengan Metode Kerangka Sampel Area	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
14	Pendataan Statistik E-Commerce				Apr	Mei	Jun	Jul					
15	Persiapan Sensus Pertanian									Sep	Okt		
16	Survei Hortikultura dan Indikator Pertanian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
17	Pengembangan Data Hortikultura Potensi dengan Menggunakan Frame ST2013 Per Komoditas Per Rumah Tangga				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
18	Survei Perusahaan Perkebunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
19	Implementasi Pengumpulan Data Komoditas Pertanian Strategis Melalui Rumah Tangga				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
20	Survei Pertanian Terintegrasi								Agu				
21	Survei Komoditas Perikanan Potensi 2021					Mei							
22	Survei Perusahaan Peternakan dan RPH/TPH	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun						
23	Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Budidaya Ikan Komoditas Strategis Tahun 2020				Apr								
24	Survei Perusahaan Kehutanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
25	Survei Perusahaan Perikanan, TPI/PPI/PP	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei		Jul			Okt		Des
26	Survei Industri Besar dan Sedang Bulanan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
27	Survei Industri Besar/Sedang Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
28	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Tahunan								Agu				
29	Survei Industri Mikro dan Kecil (VIMK) Triwulanan	Jan			Apr			Jul			Okt		

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
30	Pendataan Industri Penggilingan Padi (PIPA)							Jul					
31	Survei Pertambangan, Energi, Penggalian, Captive Power dan Updating Direktori				Apr	Mei	Jun	Jul					
32	Survei Konstruksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa													
33	Passenger Exit Survei (PES)			Mar				Jul	Agu			Nov	
34	Survei Wisatawan Nusantara				Apr			Jul			Okt		Des
35	Kompilasi Data Statistik Ekspor	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
36	Survei Impor Daerah Perbatasan			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
37	Survei Waktu Tunggu (Dwelling Time) di Pelabuhan	Jan			Apr			Jul			Okt		
38	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha Terintegrasi	Jan			Apr			Jul			Okt		Des
39	Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa				Apr	Mei							
40	Survei Perdagangan Antar Wilayah				Apr	Mei	Jun	Jul					
41	Penyusunan Direktori Pasar dan Pusat Perdagangan					Mei	Jun	Jul	Agu				
42	Survei Angkutan Penumpang dan Barang di Terminal dan Jembatan Timbang	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
43	Survei Statistik Harga Produsen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
44	Indeks Kemahalan Konstruksi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
45	Survei Harga Perdagangan Besar	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
46	Survei Harga Konsumen dan Survei Volume Penjualan Eceran Beras	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
47	Survei Harga Perdesaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
48	Statistik Lembaga Keuangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul					
49	Survei Statistik Badan Usaha dan Pasar Modal			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul					
50	Survei Penggunaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
51	Survei Bidang Jasa Pariwisata	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
52	Survei Outbound				Apr		Jun	Jul			Okt		
53	Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik													
54	Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
55	Metropolitan Statistical Area (MSA)				Apr	Mei	Jun	Jul					
56	Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Barang Triwulanan 2010=100 (SKNTP Barang)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
57	Penyusunan Nilai Tambah Lapangan Usaha Jasa Triwulanan 2010=100 (SKNTP Jasa)		Feb		Apr			Jul			Okt		
58	Penyusunan Matriks Trade and Transport Margin (TTM) Berbasis SNA 2008				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
59	Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2010=100		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt		
60	Implementasi SEEA dalam SISNERLING Indonesia				Apr	Mei	Jun	Jul					

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
61	Penyusunan Komponen Pengeluaran Rumah Tangga dan Institusi Nirlaba Triwulanan/ Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES			Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
62	Penyusunan Neraca Pemerintah dan Badan Usaha					Mei	Jun	Jul	Agu				
63	Penyusunan Komponen Pengeluaran Pemerintah Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES (Tanpa Subkomponen)		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
64	Penyusunan Komponen PMTB dan Inventori Triwulanan/Tahunan dan Penyusunan SUT/IO Sisi USES (Tanpa Subkomponen)				Apr	Mei	Jun	Jul	Agu				
65	Penyusunan Konsolidasi PDRB Pengeluaran Triwulanan dan Tahunan						Jun	Jul	Agu				

**Lampiran 4. Capaian Kinerja Triwulanan (CKT)
BPS Kabupaten Bekasi Tahun 2023**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Periode	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	T.1. Menyediakan Data Statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan	SS.1. Meningkatnya Pemanfaatan data statistik yang berkualitas	Persentase Pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan,	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	95,00	97,73	102,87
			Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan	Persen	TW I	4,00	4,00	22,22
					TW II	6,00	8,00	44,44
					TW III	10,00	13,00	77,78
					TW IV	17,00	21,00	120,00
2	T.2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN	SS.2.Penguatan Komitmen K/L/D/I terhadap SSN	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	20,00	40,00	50,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	80,00	80,00	100,00
			Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	40,00	120,00	120,00
					TW IV	80,00	120,00	120,00
3	T.3. Meningkatnya Pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN	SS3. Penguatan Statistik Sektoral K/L/D/I	Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	40,00	40,00	50,00
					TW IV	80,00	80,00	100,00
4	T.4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi	SS4. SDM Statistik yang Unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Point	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	74,50	73,74	98,98
			Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS	Persen	TW I	0,00	0,00	0,00
					TW II	0,00	0,00	0,00
					TW III	0,00	0,00	0,00
					TW IV	95,00	95,71	100,75

Lampiran 5. Respon Rate Sensus dan Survei Tahun 2023

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Pendekatan Rumah Tangga		142.080	125.851	88,58
Bidang Sosial				
	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Semesteran	11.980	12.299	
	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahunan	17.970	17.178	
	Pra Pemutakhiran Long Form SP2020	10.362	10.362	
	Survei Sosial Ekonomi Nasional KOR dan Konsumsi	32.030	31.893	
	Survei Efektivitas Program Bantuan Sosial	5.251	4.977	
	Survei Perilaku Anti Korupsi 2021	1.616	1.472	
	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2021	5.990	5.972	
Bidang Produksi				
	Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan	16.000	4.596	
	Survei Hortikultura Potensi (SHOPI)	3.009	1.586	
	Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI)	16.631	14.136	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	4.920	4.920	
	Survei Biaya Hidup (Listing)	450	450	
	Survei Harga Gabah	2.808	3.054	
	Survei Harga Perdesaan	8.016	8.016	
	Survei E-commerce (Listing)	558	558	
	Survei Wisatawan Mancanegara (Passenger Exit Survey)	29	0	
	Survei Profil Pasar (Konsumen)	860	860	
Bidang Neraca				
	Survei SKKRT Triwulanan	3.240	3.162	
	Survei SKTIR Tahunan	360	360	
Pendekatan Usaha		108.601	76.294	70,25
Bidang Produksi				
	Survei Perusahaan Perikanan Bulanan (Budidaya)	108	84	
	Survei Perusahaan Perikanan Tahunan (Penangkapan)	1	1	
	Survei TPI/PPI	288	288	
	Survei Perumahan Perkebunan Triwulanan	292	181	
	Survei Perumahan Perkebunan Tahunan	147	56	
	Survei Perusahaan Peternakan Tahunan (LTU, LTT, LTS)	239	117	
	Survei RPH/TPH	572	429	
	Survei KPPT	1.716	1.287	
	Survei Perusahaan Kehutanan (Perum dan STL)Tahunan	42	37	
	Survei Perusahaan Hortikultura (VP Horti)	23	17	
	Survei IBS Bulanan	5.148	2.796	

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
	Survei Tahunan Industri Perusahaan Manufactur	16.805	2.956	
	Survei IMK Triwulanan	6.808	5.106	
	Survei IMK Tahunan	11.064	11.064	
	Survei Updating Konstruksi	1.500	1.529	
	Survei Konstruksi Triwulanan	688	250	
	Survei Konstruksi Tahunan	591	250	
	Survei Pertambangan Energi	1.783	1.421	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	4.950	4.950	
	Survei Harga Perdagangan Besar	5.980	5.998	
	Survei Harga Kemahalan Konstruksi	324	324	
	Survei Harga Beras di Penggilingan	1.440	1.440	
	Survei Harga Produsen Sektoral	14.856	14.259	
	Survei Harga Produsen Pertanian	192	187	
	Survei Harga Produsen Jasa	1.296	1.254	
	Survei Harga Perdagangan International	1.848	1.154	
	Survei Valas	82	79	
	Survei Koperasi	1.023	1.058	
	Survei Badan Usaha Milik Daerah	96	95	
	Survei Pola Distribusi Barang dan Jasa (POLDIS)	482	476	
	Survei Perdagangan dan PAW	1.617	1.262	
	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU)	801	387	
	Survei Profil Pasar (Pedagang)	1.134	1.146	
	Survei Transportasi (Bandara dan Pelabuhan)	144	108	
	Survei Dwelling Time (SDT)	33	12	
	Survei Hotel Bulanan (VHTS)	14.208	7.970	
	Survei Hotel Tahunan (VHTL)	2.909	806	
	Survei Daerah Tujuan Wisata (VDTW)	454	199	
	Survei Restoran (VREST)	1.271	208	
	Survei E-Commerce (Sampel Pencacahan)	1.249	1.240	
	Survei Karakteristik Usaha / Business Characteristics Survey (BCS)	1.454	946	
Bidang Nerwilis				
	Survei SKTNP Barang	160	150	
	Survei SKTNP Jasa	600	525	
	Survei SKNP	500	500	
	Survei SKSJ	150	150	
	Survei SMAK Tahunan	675	678	
	Survei SKSPPI Tahunan	585	592	
	Survei SKPS Tahunan	156	154	
	Survei PMTB NFS Tahunan	117	118	

Jenis Responden/ Kegiatan/ Aktivitas/ Nama Survei		Target (dokumen)	Realisasi (dokumen)	Respon Rate (%)
(1)		(2)	(3)	(4)
Pendekatan Non Rumah Tangga Non Usaha		91.907	91.934	100,03
Bidang Sosial				
	Pendataan Potensi Desa 2021	6.611	6.611	
	Survei Statistik Politik dan Keamanan 2021	3	3	
	Survei Statistik Lingkungan Hidup	2	2	
	Survei Sumber Daya Laut dan Pesisir	2	2	
	Penyusunan Data IDI 2020	2	2	
Bidang Produksi				
	Survei Kerangka Sampel Area Padi	31.224	31.224	
	Survei Kerangka Sampel Area Jagung	17.052	17.052	
	Survei Pengumpulan Data Luasan Tanaman Pangan (Padi Palawija)	15.048	15.048	
	Survei Pengumpulan Data Lahan, Benih dan Alsintan Tanaman	1.881	1.881	
	Survei Hortikultura Online (SPH Online)	15.675	15.675	
	Survei Kehutanan (Dinas) Triwulanan	4	4	
	Survei Hortikultura (Non Rumah Tangga; VN Horti)	8	8	
Bidang Distribusi				
	Survei Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras	1.704	1.704	
	Survei Keuangan Pemerintah Daerah	56	56	
	Survei Keuangan Pemerintah Desa	613	611	
	Survei Angkuta Penumpang dan Barang (SAPB)	45	45	
	Survei Panjang Jalan (PJ II/5 dan PJ II/6)	28	28	
	Survei Angkutan Jalan (AJR II/2 dan AJR II/3)	54	54	
	Survei Profil Pasar (Pengelola)	86	86	
Bidang Nerwilis				
	Survei SKLNPT Triwulanan	1.080	1075	
	Survei PMTB Tahunan	170	172	
	Survei SKLNP Tahunan	162	162	
	Survei Updating Direktori LNPRT Tahunan	270	306	
	Survei SKSIP Tahunan	27	23	
Bidang IPDS				
	Survei Kebutuhan Data (SKD)	100	100	

Lampiran 7. Tabel ARC Publikasi BPS Kabupaten Bekasi 2023

No.	Judul Publikasi	Jenis Publikasi	Deadline	Jadwal Rilis	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kabupaten Bekasi Dalam Angka 2023	Daerah Dalam Angka	23/02/2023	28/02/2023	Rilis tepat waktu
2	Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bekasi Menurut Pengeluaran 2018-2022	Publikasi Lainnya	25/04/2023	28/04/2023	Rilis tepat waktu
3	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bekasi 2018-2022	Publikasi Lainnya	31/03/2023	05/04/2023	Rilis tepat waktu
4	Kecamatan Dalam Angka (Total 23 Kecamatan)	Publikasi Lainnya	21/09/2023	26/09/2023	Rilis tepat waktu
5	Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bekasi 2023	Publikasi Lainnya	05/12/2023	08/12/2023	Rilis tepat waktu
6	Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi 2023	Publikasi Lainnya	05/12/2023	28/12/2023	Rilis tepat waktu

Lampiran 8. Persentase Konsumen K/L/OPD Menurut Wilayah PST dan Penggunaan Data BPS untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan SKD 2021

Kode Daerah	Nama Daerah	Menggunakan Data BPS untuk Perencanaan dan Money (%)
(1)	(2)	(3)
3200	Kabupaten Bekasi	100
3216	Bekasi	100

* Sumber : Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bekasi 2021

Lampiran 9. Persentase Konsumen yang Puas Terhadap Sarana dan Prasarana Menurut Wilayah PST SKD 2021

Kode Daerah	Nama Daerah	Puas (%)
(1)	(2)	(3)
3200	Kabupaten Bekasi	98,48
3216	Bekasi	98,48

* Sumber : Analisis Hasil Survei Kebutuhan Data BPS Kabupaten Bekasi 2022



DATA
MENCERDASKAN BANGSA

